

**PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BONE BOLANGO**
**(Studi pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone Bolango)**

OLEH

LILIS A UDAILI
E.11.16.055

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BONE BOLANGO**

(Studi Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bone Bolango)

O L E H :

LILIS A UDAILY

E.11.16.055

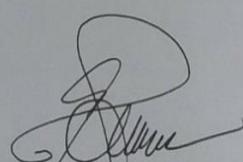
SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal2020

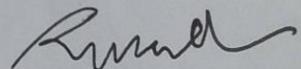
Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Reyther Bikri, SE., M.Si
NIDN: 09 270770 01



Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak
NIDN: 09 020864 02

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN BONE BOLANGO
(Studi Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone Bolango)

OLEH

LILIS A. UDAILI

E.11.16.055

Telah Memenuhi Syarat dan Dipertahankan Pada Komisi Ujian Skripsi

Hari/Tanggal : Senin, 03 Agustus 2020

Komisi Pengaji :

1. Dr. Darnawati, S.Pd., M.Si
2. Melinda Ibrahim, SE., M.SA
3. Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
4. Reyther Biki, SE., M.Si
5. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak

Mengetahui



Dilan Azawan, S.Psi.,SE.,MM

NIDN 0922057502

Ketua Program Studi Akuntansi

Rahma Rizal, SE.,Ak.,M.Si

NIDN 0914027902

PENYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini

Gorontalo,

2020



Lilis A. Udaili

NIM : E1116055

MOTTO DAN PERSEBAHAN

MOTTO

Tidak ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada hanyalah mereka
Gagal memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya
Tiada yang lebih berat timbangan Allah pada hari akhir nanti, selain
Taqwa dan akhlaq mulia seperti wajah dipenuhi senyum untuk
Kebaikan dan tidak menyakiti sesama (HR Tirmidzi).
Oleh karena itu

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”(Q.S.AL-Insyirah:6)

PERSEBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku
(Bapak Ardi Udaili dan Ibu Alin Mahmud)

Terima kasih atas doa dan dukungan kalian yang telah kalian berikan kepada saya.
Terima kasih juga untuk keluarga yang selalu memberikan doa dan dorongan
untuk menyelesaikan akhir studi.
Terima kasih juga untuk teman-teman kelas Reguler Akuntansi A yang selalu
menyemangati saya.

TERIMA KASIH UNTUK ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa , karena atas berkat dan Rahma-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango”** sesuai dengan yang di rencanakan. Skripsi ini di buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Muhamad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Goronalo, Bapak Dr. Ariawan, S.Psi.,SE.,MM, Selaku Dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Rahma Rizal, SE.,Ak.,M.Si, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Reyther Biki.,SE.,M.Si Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini, Bapak Rusdi Abdul Karim.,SE.,M.Ak , Selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama ini serta, Ucapan Terima kasih banyak kepada kedua Orang Tua yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Serta teman-teman mahasiswa seangkatan Jurusan Akuntansi Reguler yang tidak bisa di sebutkan namanya satu

per satu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam proses penyusunan Skripsi ini.

Semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut.

Gorontalo, 2020



LILIS A UDAILI
E.11.16.055

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3), secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2015 s/d 2019. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 83,90% dan sisanya sebesar 16,10% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Pajak Hotel (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar -0,184 satuan. Pajak Restoran (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar 1,157 satuan. Pajak Hiburan (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar -0,302 satuan.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, PAD

Abstract

This study aims to determine and analyze whether Hotel Tax (X1), Restaurant Tax (X2), and Entertainment Tax (X3) simultaneously and partially have a positive and significant effect on Regional Original Income (Y) in the Financial Agency and Regional Income of Bone Regency. Bolango. This type of research is quantitative research using secondary data in the form of Budget Realization Reports from 2015 to 2019. The analysis technique used is multiple regression. Based on the results of research and analysis of Hotel Tax (X1), Restaurant Tax (X2), and Entertainment Tax (X3) simultaneously have a positive and significant effect on Regional Original Income (Y) of 83.90% and the remaining 16.10% is influenced by other variables outside the model. Hotel Tax (X1) has a negative and insignificant effect on Regional Original Income (Y), with a contribution of -0.184 units. Restaurant Tax (X2) has a positive and significant effect on Regional Original Income (Y), with a contribution of 1.157 units. Entertainment Tax (X3) has a negative and insignificant effect on Regional Original Income (Y), with a contribution of -0.302 units.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, PAD

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMPAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRAC.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Penelitian	5
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.4.1 Maksud Penelitian.....	6
1.4.2 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN	
HIPOTESIS	8
2.1 Kajian Pustaka.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Pemungutan Pajak.....	9
2.1.4 Jenis Pajak.....	10
2.1.5 Pengertian Pajak Daerah	11

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah	17
2.1.7 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	20
2.1.8 Penelitian Terdahulu	21
2.2 Kerangka Pemikiran.....	23
2.3 Hipotesis.....	23
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	25
3.1 Objek Penelitian	25
3.2 Metode Penelitian.....	25
3.2.1 Metode Yang Digunakan	25
3.2.2 Operasional Variabel Penelitian.....	26
3.2.3 Populasi dan Sampel	27
3.2.4 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.2.6 Metode Analisis dan Uji Hipotesis	30
BAB IV GAMBARAN UMUM, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian.....	35
4.1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BKPD	36
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	37
4.2 Deskriptif Data Objek Penelitian	46
4.2.1 Deskriptif Populasi dan Sampel.....	46
4.2.2 Analisis Deskriptif Statistik	47
4.3 Uji Asumsi Klasik	56
4.3.1 Uji Normalitas	57
4.3.2 Uji Multikolinaritas.....	58
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	59
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	60
4.4 Analisis Regresi Berganda	61
4.4.1 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	61
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	67

4.5.1 Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Berpengaruh Positif Dan Signifikan terhadap PAD	67
4.5.2 Pajak Hotel Berpengaruh Negatif dan Tidak Signifikan Terhadap PAD	68
4.5.3 Pajak Restoran Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap PAD	69
4.5.4 Pajak Hiburan Berpengaruh Negatif dan Tidak Signifikan Terhadap PAD	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pajak Daerah.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian.....	26
Tabel 3.2 Populasi.....	28
Tabel 3.3 Sampel.....	29
Tabel 4.1 Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian.....	46
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif	47
Tabel 4.4 Pengujian Autokorelasi	60
Tabel 4.5 Pengujian Runs Test.....	61
Tabel 4.6 Pengujian Regresi	62
Tabel 4.7 Pengujian Goodness of Fit Test	63
Tabel 4.8 Interpretasi nilai Korelasi.....	64
Tabel 4.9 Pengujian Hipotesis Parsial.....	65

DAFTAR GRAFIK

Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Pajak Hotel	49
Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Pajak Restoran.....	51
Gambar 4.3 Grafik Perkembangan Pajak Hiburan.....	53
Gambar 4.4 Grafik Perkembangan PAD	55
Gambar 4.5 Grafik Histogram.....	57
Gambar 4.6 Grafik PP Plot Residual.....	58
Gambar 4.7 Grafik Scatterplots.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 3.1 Regresi Berganda	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data sekunder	77
Lampiran 2 : Hasil Pengujian Statistik.....	78
Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Dari Lokasi Penelitian.....	81
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	82
Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi	83
Lampiran 6 : Hasil Turnitin.....	84
Lampiran 7 : Riwayat Hidup.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemberlakuan otonomi daerah telah membuka ruang bagi daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri untuk menentukan kebijakan dan penentuan peraturan lainnya. Berbagai aturan yang dirancang pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional. Berdasarkan wewenang dari pemerintah pusat tersebut, maka pemerintah daerah akan menjadikannya sebagai peluang dalam pengembangan potensi ekonomi di daerahnya masing-masing, Mentayani dkk (2014:31)

Otonomi Daerah disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia merupakan Negara yang terdiri atas beberapa Provinsi dan setiap Provinsi terdiri atas beberapa daerah, terdiri atas daerah Kabupaten. Banyak daerah diindonesia pemerintahan sulit mengkoordinasi pemerintah pusat sehingga yang ada didaerah membuat memudahkan untuk pelayanan penataan dan pemerintah, maka yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi maka pemerintah pusat mengubah dalam yang tercantum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Lahirnya otonomi daerah tersebut kebijakan Desentralisasi. Pada Tahun

2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan dianggap perkembangan keadaan, penyelenggaraan otonomi daerah ketatanegaraan dan tuntutan daerah sehingga digantikan dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan kembali mengalami kedua perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintahannya berhak mengatur urusan sendiri pemerintah daerah, sehingga rencana kerja diperlukan dalam bentuk pendapatan suatu yang dijabarkan, pembiayaan dan belanja. Rencana kerja pemerintah daerah tersebut akan terasa optimal apabila penyelenggaraan pemerintah daerah diimbangi dengan keuangan yang memadai. Salah satu sumber keuangan daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan telah menetapkan bahwa salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Pajak adalah berdasarkan Undang-Undang kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut diindonesia sangat berkaitan dengan dinamika yang berkembang pada masyarakat. Hal ini mendorong lahirnya reformasi perpjakan dan retribusi daerah pada tahun 2009, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010.

Pajak Daerah sebagai komponen utama PAD, dibagi menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak Kabupaten/ Kota menjadi 11 pajak, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak merupakan kewajiban kepada yang berwajib, maka dituntut kesadaran bagi wajib pajak untuk patuh melaporkan dan menyetor agar dapat meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). dari 11 Pajak Kabupaten/ Kota saya hanya dapat meneliti 3 yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

**Tabel 1.1: Laporan Realisasi Anggaran Pajak Daerah dan
Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Triwulan	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Realisasi PAD
2015	I	1.550.000	91.014.804	2.250.000	9.818.384.552
	II	1.850.000	246.025.535	2.250.000	25.164.932.036
	III	4.730.000	380.563.652	2.250.000	31.359.543.006
	IV	5.530.000	579.815.712	2.250.000	54.420.838.966
2016	I	2.650.000	132.020.289	-	11.799.250.889
	II	3.650.000	353.262.877	-	27.739.873.854
	III	6.000.000	597.590.562	5.310.000	45.485.851.229
	IV	7.550.000	861.841.020	6.585.000	62.079.454.189
2017	I	3.060.000	114.133.583	-	15.199.765.386
	II	5.210.000	338.493.337	1.530.000	28.515.293.147
	III	9.810.000	579.316.264	2.490.000	50.070.137.196
	IV	12.260.000	979.521.012	9.831.000	86.197.832.174
2018	I	4.800.000	165.505.588	6.371.000	12.011.705.447
	II	9.470.000	464.176.819	10.274.000	30.693.888.114
	III	15.020.000	768.416.503	11.586.500	45.104.701.361
	IV	23.030.000	1.361.459.952	13.262.500	65.095.212.711
2019	I	3.959.000	268.610.000	7.615.000	7.345.456.000
	II	12.640.000	643.063.000	8.266.000	21.454.440.000
	III	21.312.000	1.097.376.000	8.966.000	53.255.440.000
	IV	26.612.000	1.628.046.000	8.966.000	75.724.604.000

Sumber: Badan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Bone Bolango

Dari data tersebut, terlihat jelas bahwa Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015 sampai 2018 dilihat dari laporan pertriwulan selalu mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan kinerja suatu daerah, untuk itu bagaimana pengaruhnya hal ini tentunya akan diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango, yang diformulasikan dalam judul penelitian: **“Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Hiburan (X3) Berpengaruh secara *simultan* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango (Y) .
2. Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel (X1) secara *parsial* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango (Y).
3. Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah yang meliputi Pajak Restoran (X2) secara *parsial* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango (Y).
4. Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hiburan (X3) secara *parsial* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango (Y).

1.3 Batasan Masalah

Megigit begitu luas ruang lingkup pajak daerah dalam penelitian ini maka penulis membatasi permasalahan tersebut dengan hanya membahas beberapa bagian pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk dapat memperoleh data berupa Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) dan Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Daerah Kabupaten Bone Bolango.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) secara *simultan* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango (Y).
2. Untuk mengetahui besarnya Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel (X1), secara *parsial* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango (Y).
3. Untuk mengetahui besarnya Pajak Daerah yang meliputi Pajak Restoran (X2) secara *parsial* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango (Y).
4. Untuk mengetahui besarnya Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hiburan (X3) secara *parsial* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango (Y).

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi pembaca penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Pajak Daerah.

2. Manfaat Praktis

Melalui sumber ini dapat digunakan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab mereka dalam pendapat asli daerah.

3. Manfaat Untuk Penelitian

Sebagai peneliti yang akan mengadakan penelitian agar dapat menggunakan teori-teori yang telah dipelajari, sehingga dapat digunakan untuk refrensi dalam melakukan penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang “perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Waluyo (2011:2) pajak adalah “terutang kepada pengusaha oleh dan prestasi yang dipaksakan sepihak (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa danya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk mentup pengeluaran-pengeluaran”. Menurut Sugrisno Agoes (2014:6) “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, berdasarkan undang- undang serata aturan yang ditetapkan oleh negara dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

individual oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) fungsi pajak dapat di bedakan menjadi 2 bagian yaitu :

1. Berfungsi sebagai anggaran (*Budgetair*)

Yaitu merupakan pajak sebuah dana sumber untuk pemerintah dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Berfungsi sebagai mengatur (*Regulerend*)

Yaitu merupakan alat dalam mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Pemungutan Pajak

Selanjutnya Mardiasmo (2018:4) mengemukakan bahwa “dalam memungut pajak maka akan menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka untuk itu pemungutan pajak dapat memenuhi syarat :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).

dengan Sesuai tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-ndang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundangan-dian taranya mengenakan pajak secara umum da merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak Menganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Harus Efisiaen (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Pemungutan yang sederhana dapat memudahkan serta mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru”.

2.1.4 Jenis Pajak

Etty Muyassaroh (2013:8-9) mengemukakan bahwa “ada beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- a. Menurut golongannya: Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: pajak penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifatnya:

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasar pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut lembaga pemungutnya:

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah”.

2.1.5 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soelarno dalam Lutfi (2006:7) pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibanya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan Pajak Daerah adalah pemerintah daerah kepada masyarakat ditunjukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna meningkatkan daya tarif hidup masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:"

1. Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua bela pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual

beli, tukar menukar, dll

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/ Kota

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,

baik dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkanPajak Parkir

g. Pajak parkir

adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediaakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak bumi dan bagunan yang dimiliki , dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutaan dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas

perolehan hak atas tanah dan bangunan”.

1. Pajak Hotel

Sugianto (2008:43) mengemukakan bahwa “pajak hotel merupakan jenis pajak dalam bentuk pelayanan hotel, sedangkan hotel merupakan gedung yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat dan memperoleh pelayanan, fasilitas lainnya selama menginap dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama”.

Yang menjadi objek pajak hotel yaitu pelayanan yang disiapkan yang meliputi :

- a. Hotel dengan fasilitas tinggal dalam jangka pendek,
- b. Pelayanan penunjang lainnya yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,
- c. Fasilitas olahraga atau hiburan untuk para tamu hotel,
- d. Termasuk juga jasa sewa ruangan pelaksanaan kegiatan acara/pertemuan

Sedangkan subjek pajak hotel menurut Sugianto (2008:43) “adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel, sedangkan wajib pajak adalah pengusaha hotel. Dasar pengenaanya adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel, sedangkan tarif paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah setempat. Besarnya pajak hotel terutang dapat dihitung dengan mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak”.

2. Pajak Restoran

Sugianto (2008: 43-44) mengemukakan bahwa “pajak restoran adalah

pelayanan atas pajak restoran, sedangkan restoran merupakan tempat untuk makan dan minum yang disediakan serta dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga. Selanjutnya Objek pajak restoran merupakan pelayanan yang disiapkan oleh restoran dengan pembayaran dalam arti bahwa setiap orang yang mengonsumsimakanan didalam suatu restoran akan diakui pembayaran, termasuk dalam objek restoran atau rumah makan terhadap penjualan makanan danminuman. Namun, rumah makan tertentu yang tidak dikenakan pajak ialah restoran atau rumah makan dengan peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah”.

Sugianto (2008: 44) menjelaskan bahwa “subjek pajak restoran adalah pribadi/badan yang melakukan pembayaran kepada restoran karena mengonsumsi makanan atau minuman, sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha restoran dan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh restoran, sedangkan tarif ditetapkan dengan peraturan daerah setempat, paling tinggi 10%. Besar pajak terutang diperoleh dengan mengalikan dasar penganaan dengan tarif”.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan jenis pajak dalam kegiatan hiburan, sedangkan hiburan adalah seatu jenis hiburan dalam bentuk pertunjukan, permainan, ketangkasan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Penyelenggaraan suatu hiburan yang penontonnya dipungut bayaran akan dikenakan pajak yang disebut pajak hiburan/ pajak tontonan. Sugianto (2008:44)

Yang dimaksud dengan hiburan, antara lain, ialah tontonan filim,

kesenian, pengelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijar, mandi uap dan pertandingan olahraga. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau pun bida usaha yang menonton atau menikmati hiburan atau tontonan yang diselenggarakan, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan-badan usaha yang menyelenggarakan hiburan dan tontonan. Dasar pengenaan pajak adalah pembayaran yang seharusnya dibayar adalah termasuk pemberian potongan harga atau tiket Cuma-Cuma. Tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah maksimum sebesar 35%. Untuk menghitung besarnya pengenaan pajak hiburan ialah dengan dengan jalan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan. Sugianto (2008:44-45)

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali perdanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Menurut Yoyo Sudaryo (2017:104) PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan nonpajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Menurut Mardiasmo (2016: 132),

PAD adalah yang diperoleh penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari pengertian diatas saya dapat menyimpulkan PAD adalah hasil pajak yang telah diterima dari beberapa pajak yang terdapat di daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli daerah Sendiri yang sah:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi
 - c. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari:
 - a. Sumbangan dari pemerintah
 - b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
 - c. Pendapatan lain-lain yang sah

Dalam Febri Mandra (2013:10), dilaksanakan Peningkatan Pendapatan

Daerah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Intensifikasi, melalui upaya:
 - a. Dan Pendapatan permajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah. Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
 - b. Mengintensifikasi penerimaan retribusi yang ada.
 - c. Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.
2. Penggalian sumber-sumber penerimaan baru

pendapatan daerah agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi tersebut Penggalian sumber-sumber harus ditekankan. Sebab, tujuan pada dasarnya melalui upaya eksentifikasi meningkatkan pendapatan daerah adalah ekonomi dimasyarakat untuk meningkatkan kegiatan. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting meningkat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang

dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2.1.7 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Samudra (2015:52) Pajak Daerah merupakan salah satu sumbe yang penting guna membiayai pendapatan daerah pelaksanaan daerah dalam pemerintah. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam kemandirian daerah, serta dilakukan perluasan objek pajak daerah perlu ditentukan dalam besarnya tarif menentukan pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Fitriana (2014:1884) penerimaan pajak daerah semakin tinggi maka akan meningkatkan pendapata asli daerah, rendah penerimaan pajak daerah maka akan semakin menurun pendapatan asli daerah. dapat disimpulkan Maka bahwa pajak daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

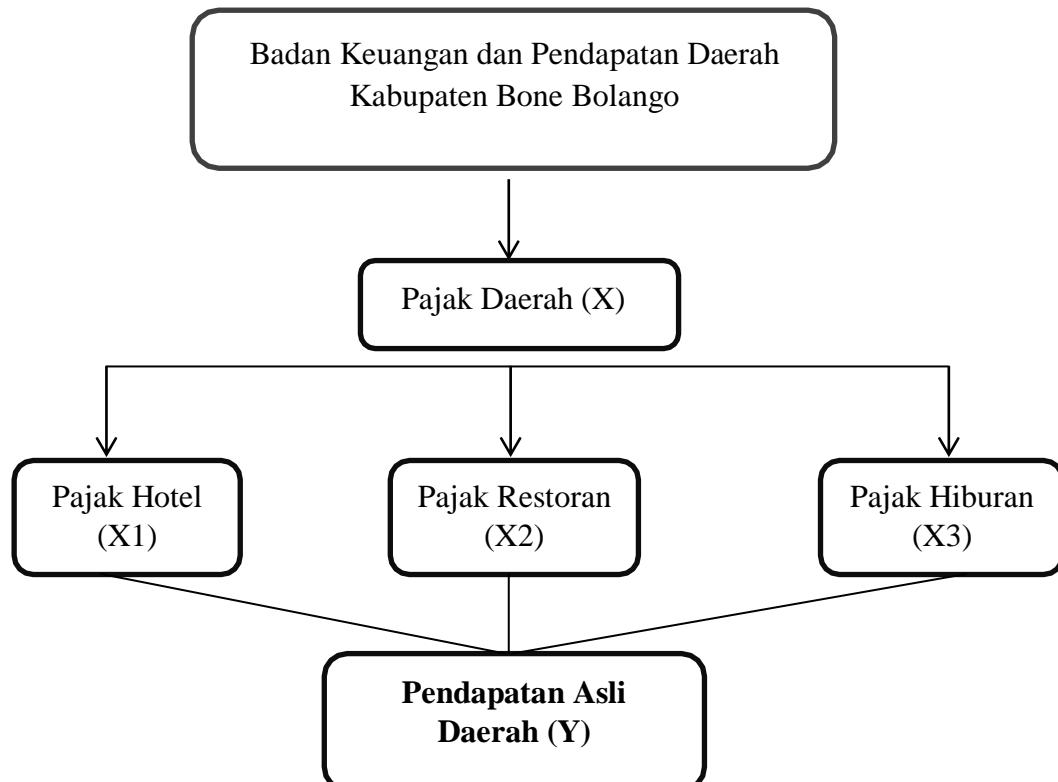
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Metode/ Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Regina Usman (2015)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kuantitatif	Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial Pajak daerah berpengaruh signifikan secara produktif terhadap Pendapatan Asli Daerah sementara Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Pariabel independen yang digunakan Pajak Daerah dan pariabel independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah perbedaannya yaitu pada penelitian Regina Usman ini variabel independen ditamba dengan Retribusi Daerah sebagai X2 sedangkan penelitian saya hanya Pajak Daerah sebagai variabel independen

2.	Fikri dan Ronny a (2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 201202016	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan perngaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu baik secara simultan maupun secara parsial	Persamaannya adalah menggunakan ketiga variabel x untuk dijadikan variabel penelitian. Perbedaannya pada penelitian ini menggunakan data laporan PAD berdasarkan triwulan
3.	Lewas ari (2019)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut perspektif Ekonomi Islam Studi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Bandar Lampung	Kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak restoran dan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dikota Bandar lampung.	Persamaannya adalah adanya kesamaan variabel independen dan variabel dependen pendapatan asli daerah, perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menggunakan data tahunan untuk melakukan analisis data sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data secara triwulan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan suatu model kerangka pemikiran sehubungan dengan penelitian ini yaitu :



Gamabar 1.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

1. Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) secara *simultan* berpengaruh positif dan *signifikan* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel (X1), secara *parsial* berpengaruh positif dan *signifikan* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Pajak Daerah yang meliputi Pajak Restoran (X2) secara *parsial* berpengaruh positif dan *signifikan* terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Bone Bolango.

4. Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hiburan (X3) secara *persial* berpengaruh positif dan *signifikan* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah Pengaruh Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Hiburan (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bone Bolango.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan adalah serangkaian tahapan penelitian yang menggambarkan prosedur penelitian, sampai pada menguji hipotesis penelitian, dan membuat suatu kesimpulan-kesimpulan yang valid mengenai hubungan atau saling mempengaruhi antara variabel independen dengan variabel dependen pada penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango ditahun 2015-2019 yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Menurut Sugiyono (2013:23) “metode penelitian kuantitatif yaitu sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme, untuk digunakan meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan".

3.2.2 Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel adalah batasan pengertian tentang variabel yang diteliti yang didalamnya adalah mencerminkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur indikator-indikator yang bersangkutan.

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango (X)	Pajak Hotel (X1)	Realisasi Pajak Hotel.	Nominal
	Pajak Restoran (X2)	Realisasi Pajak Restoran.	Nominal
	Pajak Hiburan (X3)	Realisasi Pajak Hiburan.	Nominal

Sumber: X Badan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Bone Bolango

Variabel	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah	Nominal

Sumber: Y berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004

3.2.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:61). Populasi adalah wilaya generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Sudjana (2004:68), populasi adalah totalitas semua hasil yang menghitung pengukuran kuantitatif pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan hasil pengukuran yang menjadi suatu objek peelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Bone Bolango.

Tahun	Triwulan	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Realisasi PAD
2015	I	1.550.000	91.014.804	2.250.000	9.818.384.552
	II	1.850.000	246.025.535	2.250.000	25.164.932.036
	III	4.730.000	380.563.652	2.250.000	31.359.543.006
	IV	5.530.000	579.815.712	2.250.000	54.420.838.966
2016	I	2.650.000	132.020.289	-	11.799.250.889
	II	3.650.000	353.262.877	-	27.739.873.854
	III	6.000.000	597.590.562	5.310.000	45.485.851.229
	IV	7.550.000	861.841.020	6.585.000	62.079.454.189
2017	I	3.060.000	114.133.583	-	15.199.765.386
	II	5.210.000	338.493.337	1.530.000	28.515.293.147
	III	9.810.000	579.316.264	2.490.000	50.070.137.196
	IV	12.260.000	979.521.012	9.831.000	86.197.832.174
2018	I	4.800.000	165.505.588	6.371.000	12.011.705.447
	II	9.470.000	464.176.819	10.274.000	30.693.888.114
	III	15.020.000	768.416.503	11.586.500	45.104.701.361
	IV	23.030.000	1.361.459.952	13.262.500	65.095.212.711
2019	I	3.959.000	268.610.000	7.615.000	7.345.456.000
	II	12.640.000	643.063.000	8.266.000	21.454.440.000
	III	21.312.000	1.097.376.000	8.966.000	53.255.440.000
	IV	26.612.000	1.628.046.000	8.966.000	75.724.604.000

Sumber : Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango.

2. Sampel

Sampel merupakan wakil atau bagian dari populasi. Sedangkan sampel dalam penelitian yaitu sebagian dari populasi yang diambil oleh peneliti sebagai sumber data yang mewakili seluruh populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode sampel jenuh. Sampel jenuh berdasarkan pada ketentuan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:61-63), yang mengatakan bahwa, Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus.

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus metode. Sensus metode adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Maka yang menjadi sensus metode dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Bone Bolango.

Tahun	Triwulan	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Realisasi PAD
2015	I	1.550.000	91.014.804	2.250.000	9.818.384.552
	II	1.850.000	246.025.535	2.250.000	25.164.932.036
	III	4.730.000	380.563.652	2.250.000	31.359.543.006
	IV	5.530.000	579.815.712	2.250.000	54.420.838.966
2016	I	2.650.000	132.020.289	-	11.799.250.889
	II	3.650.000	353.262.877	-	27.739.873.854
	III	6.000.000	597.590.562	5.310.000	45.485.851.229
	IV	7.550.000	861.841.020	6.585.000	62.079.454.189
2017	I	3.060.000	114.133.583	-	15.199.765.386
	II	5.210.000	338.493.337	1.530.000	28.515.293.147
	III	9.810.000	579.316.264	2.490.000	50.070.137.196
	IV	12.260.000	979.521.012	9.831.000	86.197.832.174
2018	I	4.800.000	165.505.588	6.371.000	12.011.705.447
	II	9.470.000	464.176.819	10.274.000	30.693.888.114
	III	15.020.000	768.416.503	11.586.500	45.104.701.361
	IV	23.030.000	1.361.459.952	13.262.500	65.095.212.711
2019	I	3.959.000	268.610.000	7.615.000	7.345.456.000
	II	12.640.000	643.063.000	8.266.000	21.454.440.000
	III	21.312.000	1.097.376.000	8.966.000	53.255.440.000
	IV	26.612.000	1,628.046.000	8.966.000	75.724.604.000

Sumber : Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango.

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

3.2.4.1 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang masih perlu

dianalisis.

3.2.4.2 Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolanggo.

3.2.5 Tehnik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik pengumpulan data penelitian memerlukan teknik sebagai alat bantu agar pekerjaan pengumpulan data menjadi lebih mudah. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan dan data yang relevan. Dokumentasi yang dilakukan dengan mengadakan penelaan dan pencatatan dokumen-dokumen tertulis perusahaan. Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen yang ada di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2015-2018.

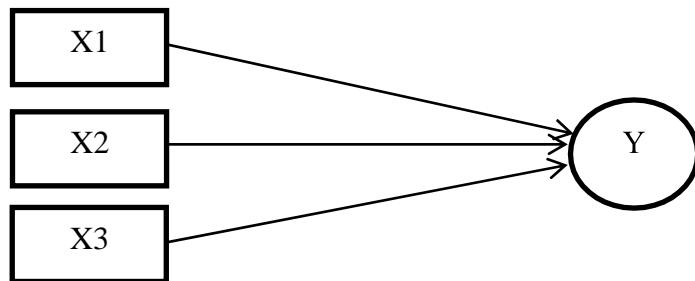
3.2.6 Metode Analisis dan Uji Hipotesis

1. Metode Analisis

Untuk metode analisis ini peneliti menggunakan regresi berganda. untuk mengetahui

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriteria), variabel independen sebagai faktor prediktor. Persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$



Gambar 3.1: Struktur Regresi Berganda

2. Pengujian Hipotesis

Uji Asumsi Klasik

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka untuk memenuhi syarat statistik parametrik maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi isi ditunjukkan oleh nilai *error* yang distribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang dimiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS. Menurut Singgih Santoso (2012:293) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan propabilitas (*Asymtot*

Significance), yaitu:

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
 - b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.
2. Uji Multikolineritas
- Uji multikolineritas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka terdapat *problem multikolineritas*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terbukti ada multikolineritas, sebaiknya salah satu independen yang adadikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diuang kembali. Singgih Santoso (2010:234). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolineritas dapat dilihat dari besarnya *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman atau suatu model regresi yang bebas multikolineritas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolineritas. Gujarati (2012:432). Menurut Singgih Santoso (2012:236) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{VIF} = \frac{1}{\text{Tolerance}} \quad \text{Atau} \quad \text{Tolerance} = \frac{1}{\text{VIF}}$$

3. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi yang dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

apakah dalam sebuah model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi. Singgih Santoso (2012:241).

4. Uji t

Uji t melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini melakukan untuk mengetahui signifikan peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengansumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Menurut Sugiyono (2012:230), menggunakan rumus:

$$t = \frac{t\sqrt{n} - 2}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan:

t = Distribusi t

r = Koefisien kolerasi

r^2 = Koefisiendeterminas

n = Jumlah data

5. Uji F

Uji f adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini melakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat didalam model secara bersama-sama (simulan)

terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2012:257):

$$f = \frac{R^2/K}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi

K = Jumlah Variabel independen

n = Jumlah data

BAB IV

GAMBARAN UMUM, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian

Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas, dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Keuangan Penadapatan Daerah Bone Bolango.

Selaras dengan penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang diatur dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 di mana mewajibkan pada setiap SKPD menyusun sebuah Rencana Kerja (RENJA) SKPD, Penyusunan RENJA SKPD ini akan berpedoman pada RENSRA SKPD serta mengacu pada RKPD, Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunanya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Menimbang Tahunan yang

diselenggarakan secara berjenjang untuk Rancangan Renja SKPD.

Kemudian pada tanggal 1 januari 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Bolango No 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD) berubah menjadi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD).

4.1.2 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran BKPD

Pencapaian pembangunan akan berhasil jika memiliki arah yang jelas yaitu adanya suatu visi dan misi. Visi dan Misi selaras dengan Rencana strategi (Renstra) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program Pembangunan Daerah Oleh sebab itu Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango dalam mencapai visi dan misi ini telah membuat Rentra yang mencakup visi dan misi pemerintah Kabupaten Bone Bolango Periode 2016-2020.

Visi BKPD Bone Bolango yang berfungsi sebagai Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka mendorong tercapainya suatu tatanan pemerintahan daerah yang baik (*Good Governance*). Adapun Visi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango yaitu “sebagaimana menjadi pengelola keuangan daerah yang terpercaya (amanah) guna mendorong terwujudnya tata pemerintah yang baik (*Good Governance*) melalui upaya peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah serta asset yang tertib, efisien, transparan, bertanggung jawab dan taat pada peraturan perundang-undang”.

Misi yaitu terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan misi yang dirumuskan untuk “Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Profesional”. Tujuannya yaitu“ Pengelolaan Keuangan Daerah Semakin Berkualitas” dengan indikator tujuan “ Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan sasaran sebagai berikut. Sasaranya yaitu 1).Terwujudnya system dan prosedur pertanggungjawaban keuangan daerah.2). Terwujudnya peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). 3). Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan indicator sasaran : Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat BKPD Kabupaten Bone bolango sebagaimana dijelaskan berikut ini “

1. Kepala Badan bertugas membantu Kepala Daerah dan mempunyai fungsi yaitu:
 - a. Pengkoordinasiaan, menyusun dan melaksanakan aturan pengelolaan dibidang keuangan, bidang pendapatan, dan asset daerah.
 - b. Pengkoordinasiaan, merumuskan aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah.
 - c. Pengkoordinasian penyusunan penrencanaan dibidang keuangan, pendapatan dan asset daerah
 - d. Mengkoordinasikan, menata dan mengkoodinir kegiatan operasional dibidang keuangan, pendapatan dan asset daerah.

- e. Mengkoordinir juga memimpin semua kegiatan dilingkungan bidang keuangan, pendapatan asset daerah.
 - f. Mengkoordinasikan penyelengaraan aturan-aturan dan manajemen dalam bidang keuangan dan pendapatan asset daerah
 - g. Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan penialian pada kegiatan program dan kegiatan dibidang keuangan, pendapatan dan asset daerah.
 - h. Pengkoordinasian penyusunan laporan dibidang keuangan pendapatan dan asset daerah
 - i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dari kewenangan Badan.
2. Sekretaris. Tugas sekretaris meliputi tugas pada bidang umum kepegawaian, bidang keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan selain itu juga menjalankan tugas-tugas sesuai instruksi dari pimpinan berdasarkan bidang tugasnya. Sekretaris memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rencana strategi program, pelaksanaan kegiatan dan membantu bagian keuangan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan
 - b. Menyusun rencana program kegiatan pelaksanaan tugas- tugas secara terpadu
 - c. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan program, evaluasi dan

pelaporan

3. Sekretariat terdiri dari :

- a. Bagian Umum dan Kepegawaian yang memiliki fungsi melakukan tugas dinas dibidang umum dan kepegawaian yakni:
 - a. Melakukan pengendalian surat menyurat, mengelola arsip (kearsipan) dan keprotokolan.
 - b. Melakukan pelayan dibidang administrasi umum demi kelancaran pelaksanaan tugas
 - c. Menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan.
 - d. Melakukan kegiatan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan asset milik negara dan daerah
 - e. Melakukan pengelolaan urusan umum rumah tangga, perencanaan kebutuhan dan
 - f. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sebagaimana kewenangannya.
- b. Bagian Keuangan memiliki tugas dalam melaksankan tugas dibidang keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya serta memiliki fungsi lainnya yaitu:
 - i. Melakukan koordinasi kegiatan administrasi keuangan
 - ii. Melakukan penyusunan rencana pemakaian anggaran

berdasarkan rencan operasional kegiatan

- iii. Mencatat, mengolah dan menganalisis data pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan
 - iv. Menginvertaris dan menyiapkan data realisasi anggaran sesuai rencana program kerja
 - v. Melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis
 - vi. Mengumpulkan, mengolah penyajian data perencanaan
 - vii. Melakukan evaluasi pelaksanaan program
 - viii. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya
 - a. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan. bagian ini memiliki tugas pada bidang perencanaan dan memiliki fungsi lainnya yaitu :
 - i. Melaksanakan penyusunan rencana strategi program dan kegiatan tahunan
 - ii. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana
4. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pengelolaan data pelaporan, serta memiliki fungsi lainnya yaitu:
- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan serta bidang pengembangan sistem akuntansi sebagai dasar tugas
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan

- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan verifikasi bukti pembukuan
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan
 - e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas kewenagan badan
- Bidang akuntansi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan memiliki fungsi yaitu:
 - i. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan
 - ii. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan data dan pelaporan sebagai dasar pelaksanaan tugas
 - iii. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara periodic
 - iv. Melaksanakan penyusunan dokumen /data laporan keuangan bulanan, triwulan, dan semester
 - v. Melaksankan monitoring dan evaluasi kegiatan pada suatu bidang pengelolaan data dan pelaporan
 - vi. Pelaksanaan fungsi-fungsi

5. Sub Bidang Pengembangan Sistem Akuntansi memiliki fungsi yaitu:
- a. Melaksankan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengembangan akuntansi
 - b. Melaksankan penyusunan kebijakan teknis dibidang

pengembangan system akuntansi

- c. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi laporan realisasi APBD
- d. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Leb dan catatan atas laporan keuangan

6. Bidang Pendapatan memiliki fungsi sebagai berikut yaitu:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencanakegiatan dan penyelenggaraan program dibidang pendapatan daerah
- b. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional proses penguatan pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB,
- c. Mengkoordinir pendataan subyek dan objek pajak serta penilaian objek pajak daerah dan retribusi berdasarkan ketentuan yang berlaku
- d. Mengkoordinir perekaman, pengolahan data, analisis, pencatatan dan penyajian informasi pendapatan daerahMengkoordinasikan penerbit ketetapan pajak daerah berdasarkan laporan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
- e. Melaksanakan monitoring evaluasi dan laporan pengendalian pengawasan terhadap unit kerja terkait dalam hal pengelolaan pendapatan daerah.

Bidang Pendapatan Terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pajak Daerah yang memiliki fungsi sebagai yang melaksanakan tugas dalam urusan pajak daerah serta memiliki fungsi lainnya yaitu:
 - i. Menyusun perencanaan dan langkah-langkah kerja terkait pajak daerah
 - ii. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang pelayanan pajak daerah
 - iii. Menghimpun dan mengelola data objek pajak dan subjek pajak daerah serta potensi penerimaan melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD).
 - iv. Menyusun daftar induk wajib pajak daerah
 - v. Melakukan penetapan pajak daerah melalui surat ketetapan pajak daerah (SKPD)
 - viii. Melakukan sosialisasi pajak daerah pada wajib pajak daerah
 - vii. Melakukan pengawasan serta penagihan pajak
 - Melakukan penerimaan dan penyetoran pajak melalui bendahara penerimaan penyetoran kas daerah melalui surat setoran pajak daerah(SSPD) dan surat tanda setoran (STS)
 - ix. Melakukan pembukuan atau penerimaan pajak daerah dan
 - x. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya
- b. Sub Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan terdiri dari:
 - i. Bidang Anggaran Dan Pengendalian Anggaran Yang memiliki fungsi sebagai berikut :

- ii. Melaksanakan Penyusunan rencana kegiatan dibidang anggaran dan pengendalian anggaran
 - iii. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang anggaran dan pengendalian anggaran sebagai dasar pelaksanaan tugas
 - iv. Melaksanakan penyiapan draf penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD.
 - v. Melaksankan penyelenggaraan kebijakan teknis APBD
 - vi. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang anggaran dan pengendalian anggaran sebagai bahan penyusunan laporan
 - vii. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya
- c. Sub Bidang Perbendaharaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang memiliki fungsi sebagai berikut:
- i. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang perbendaharaan dan system informasi keuangan daerahMelaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang perbendahraan dan system informasi keuangan daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas
 - ii. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah
 - iii. Melaksankan penyusunan system operasioanal prosedur pengelolaan keuangan
 - iv. Melaksankan penelitian daftar gaji

- v. Melaksankan penyiapan draf SKPP
 - vi. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang perbendaharaan dan system informasi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan
 - vii. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya
2. Bidang Aset, mempunyai tugas :
- a. Melakukan tugas pengelolaan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tertibnya kekayaan daerah
 - b. Dalam melaksanakan tugas bidang asset, menyelenggarakan fungsi :
 - c. Menghimpun kebijakan teknis pengelolaan asset daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - d. Menyusun kebijakan teknis pengelolaan asset daerah sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas
 - e. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan asset daerah sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit Merencanakan pengadaan dan pendistribusian barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan daerah sebagai pendukung kinerja pemerintah daerah
 - f. Menginventarisir barang milik daerah sesuai jenisnya untuk mengetahui keadaan kekayaan daerah
 - g. Melakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk dibebaskan dari daftar inventaris kekayaan daerah

- h. Menyusun rencana penyertaan modal / investasi daerah sesuai kebutuhan untuk peningkatan pendapatan daerah
- i. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah”.

4.2 Deskriptif Data Objek Penelitian

4.2.1 Deskriptif Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang diterbitkan setiap triwulan (tiga bulan) dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Penarikan sampel penelitian menggunakan metode sampel jenuh yaitu metode penentuan sampel yang dengan mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel.

Terdapat 20 jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang dijadikan sebagai populasi. dan diperoleh sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 17 sampel Laporan Realisasi Anggaran triwulan. Hasil dari proses penentuan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Populasi Laporan Realisasi Anggaran Triwulan 2015-2019	20
2.	Data yang tidak lengkap	3
	Jumlah sampel	17

Sumber : Data olahan laporan keuangan triwulan Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

4.2.2 Analisis Deskriptif Statistik

Deskriptif statistik memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai tertinggi (*max*), dan nilai terendah (*min*). Analisis ini digunakan untuk mengetahui deskripsi variabel penelitian yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menggambarkan analisis deskriptif dari variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pjk.Hotel	17	1.550	26.612	10.07841	7.521843
Pjk.Restorn	17	91.014	1628.046	650.04876	425.962999
Pjk.Hiburan	17	1.530	13.262	6.47365	3.774206
PAD	17	7345.456	86197.832	41399.84218	23255.959058
Valid N (listwise)	17				

Sumber : Data olahan dengan SPSS

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel yang digunakan sebanyak 17 sampel. Pajak hotel memiliki nilai terendah 1.550, nilai tertinggi 26.612, nilai rata-rata 10.07841 dengan standar deviasi 7.521843. Pajak restoran dengan nilai terendah 91.014, nilai tertinggi 1628.046, nilai rata-rata 650.04876 dengan standar deviasi 425.962999. Pajak hiburan dengan nilai terendah 1.530, nilai tertinggi 13.262, nilai rata-rata 6.47365 dengan standar deviasi 3.774206. PAD dengan nilai terendah 7345.456, nilai tertinggi 86197.832, nilai rata-rata 41399.84218 dengan standar deviasi 23255.959058.

1). Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pajak Hotel

Pajak hotel adalah salah satu jenis pajak yang dipungut langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada pengusaha hotel. Penerimaan pajak ini akan menambah jumlah pendapatan pajak daerah yang bermuara pada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone Bolango. Penerimaan pajak hotel dimulai dari triwulan pertama sampai triwulan kempat tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Yang menjadi subjek dari pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas biaya hotel. Sedangkan wajib pajak adalah para pengusaha hotel. Yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu jumlah dari pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak dengan tarif tertinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan data statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel dari tahun 2015 s/d tahun 2019 dengan nilai terendah 1.550 atau Rp.1.550.000 yaitu penerimaan pajak hotel pada triwulan pertama di bulan Januari 2015. Penerimaan pajak hotel tertinggi sebesar 26.612 atau Rp.26.612.000 yaitu terjadi pada triwulan ke empat tahun 2019. Nilai rata-rata perimaan pajak hotel selama lima tahun yaitu sebesar 10.07841 atau Rp.10.078.410.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif terssebut dapat dilihat perkembangan penerimaan pajak hotal selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2015 s/d tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.1 dibawah ini



Gambar 4.1

Grafik Perkembangan Pajak Hotel

Berdasarkan gambar grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak hotel dari tahun 2015 s/d tahun 2019. Pada tahun 2015 triwulan pertama jumlah penerimaan pajak hotel sebesar Rp.1.550.000. dan terus meningkat sampai triwulan keempat tahun 2015 sejumlah Rp. 5.530.000. Penerimaan pajak hotel pada tahun 2016 triwulan pertama sebesar Rp.2.650.000 mengalami peningkatan sampai dengan triwulan ke empat sebesar Rp.7.550.000. pada tahun 2017 triwulan pertama sebesar Rp.3.060.000. mengalami peningkatan sampai pada triwulan ke empat 2017 sebesar Rp.12.260.000. pada tahun 2018 triwulan pertama sebesar Rp. 4.800.000 dan terus meningkat sampai triwulan ke empat sebesar Rp.23.030.000. pada tahun 2019 triwulan pertama sebesar Rp.3.959.000 dan meningkat menjadi Rp.26.612.000 pada triwulan ke empat tahun 2019.

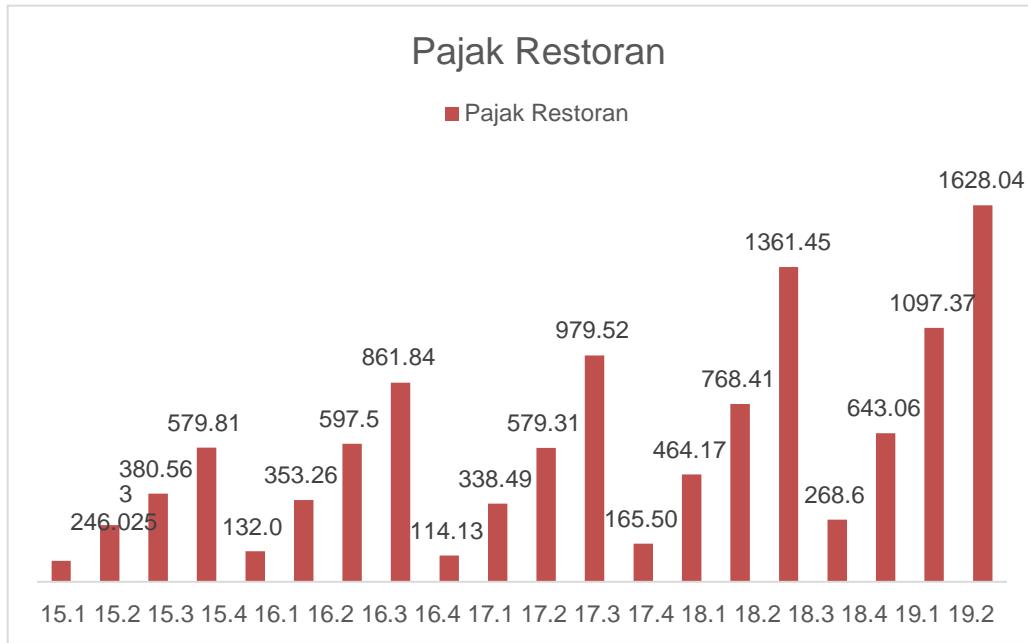
2). Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pajak Restoran

Sama halnya dengan Pajak hotel, Pajak Restoran juga merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Bolango kepada pengusaha restoran. Penerimaan pajak ini akan menambah jumlah pendapatan pajak daerah yang bermuara pada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone Bolango. Pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan restoran. Penerimaan pajak hotel dimulai dari triwulan pertama tahun 2015 sampai triwulan kempat tahun 2019.

Objek pajak respotoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yaitu setiap orang yang mengonsumsi makanan didalam suatu restoran akan diakui pembayaran, termasuk dalam objek restoran atau rumah makan terhadap penjualan makanan dan minuman. Namun, rumah makan tertentu yang tidak dikenakan pajak ialah restoran atau rumah makan dengan peredarnya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Subjek pajaknya adalah pribadi/badan yang melakukan pembayaran kepada restoran karena mengonsumsi makanan atau minuman, sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha restoran dan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh restoran, sedangkan tarif ditetapkan dengan peraturan daerah setempat, paling tinggi 10%. Besar pajak terutang diperoleh dengan mengalikan dasar penganaan dengan tarif. Berdasarkan data statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran dari tahun 2015 s/d tahun 2019 dengan nilai terendah 91.014 atau Rp.91.014.804 yaitu penerimaan pajak restoran pada triwulan pertama di bulan Januari 2015. Penerimaan pajak restoran tertinggi sebesar 1628.046 atau Rp.1.628.046.000 yaitu terjadi pada triwulan ke empat tahun 2019. Nilai rata-rata perimaan pajak restoran selama lima tahun yaitu sebesar 650.04876 atau Rp.650.048.760. Berdasarkan analisis statistik deskriptif tersebut dapat dilihat

perkembangan penerimaan pajak hotel selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2015 s/d tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.2 dibawah ini



Gambar 4.2
Grafik Perkembangan Pajak Restoran

Berdasarkan gambar grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak restoran dari tahun 2015 s/d tahun 2019. Pada tahun 2015 triwulan pertama jumlah penerimaan pajak restoran sebesar Rp.91.014.804. dan terus meningkat sampai triwulan keempat tahun 2015 sejumlah Rp. 579.815.712. Penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 triwulan pertama sebesar Rp.132.020.289. mengalami peningkatan sampai dengan triwulan ke empat sebesar Rp.861.841.020. pada tahun 2017 triwulan pertama sebesar Rp.114.133.583. mengalami peningkatan sampai pada triwulan ke empat tahun 2017 sebesar Rp.979.521.012. pada tahun 2018 triwulan pertama

sebesar Rp. 165.505.588 dan terus meningkat sampai triwulan ke empat sebesar Rp.1.361.459.952. Pada tahun 2019 triwulan pertama sebesar Rp. 268.610.000 dan meningkat menjadi Rp.1.628.046.000 pada triwulan ke empat tahun 2019.

3). Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pajak Hiburan

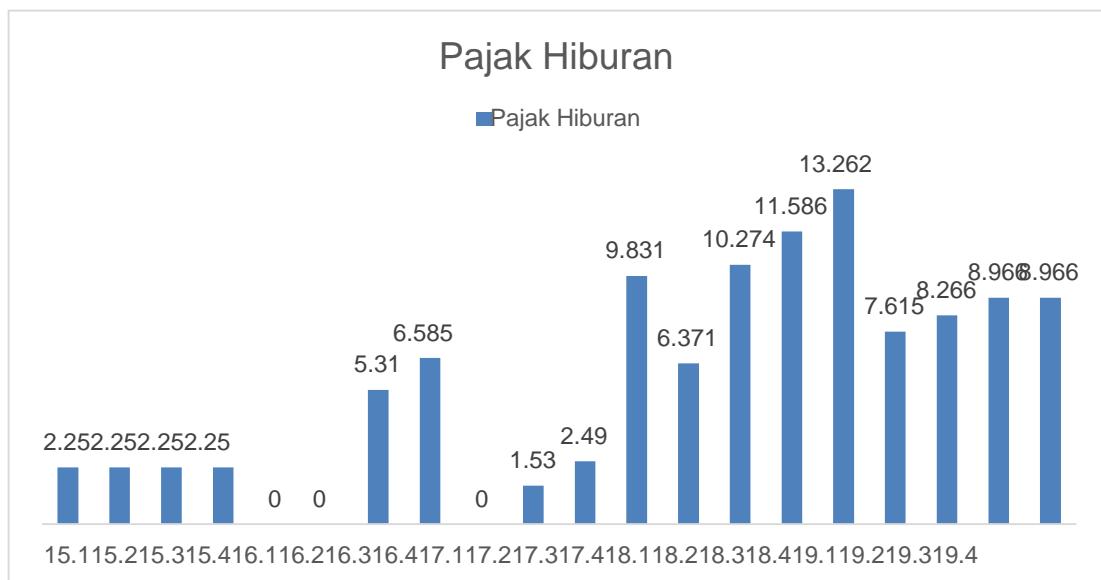
Sama halnya dengan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pajak Hiburan juga merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada pengusaha restoran. Penerimaan pajak ini akan menambah jumlah pendapatan pajak daerah yang bermuara pada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone Bolango.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan kegiatan hiburan. Penyelenggaraan suatu hiburan yang penontonnya dipungut bayaran akan dikenakan pajak yang disebut pajak hiburan. Pajak hiburan ini seperti/tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap dan pertandingan olahraga. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau pun bida usaha yang menonton atau menikmati hiburan atau tontonan yang diselenggarakan, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan-badan usaha yang menyelenggarakan hiburan dan tontonan. Dasar pengenaan pajak adalah pembayaran yang seharusnya dibayar adalah termasuk pemberian potongan harga atau tiket Cuma-Cuma. Tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah maksimum sebesar 35%.

Berdasarkan data statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan dari tahun 2015 s/d tahun 2019 dengan nilai terendah

1.530.000 atau Rp.1.530.000 yaitu penerimaan pajak hiburan pada triwulan kedua tahun 2017. Penerimaan pajak hiburan tertinggi sebesar 13.262 atau Rp.13.262.000 yaitu terjadi pada triwulan kedua tahun 2018. Nilai rata-rata perimaan pajak hiburan selama lima tahun yaitu sebesar 6.47365 atau Rp.6.473.650.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif terssebut dapat dilihat perkembangan penerimaan pajak hiburan selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2015 s/d tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.3 dibawah ini



Gambar 4.3
Grafik Perkembangan Pajak Hiburan

Berdasarkan gambar grafik di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan dari tahun 2015 s/d tahun 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2015 triwulan pertama sampai dengan triwulan ke empat tidak mengalami perubahan yaitu Rp.2.250.000. Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2016 triwulan pertama dan

kedua nihil, sedangkan pada triwulan ketiga sebesar Rp.5.310.000 dan meningkat menjadi Rp.6.585.000 pada triwulan keempat tahun 2016. Pada tahun 2017 triwulan pertama nihil pada triwulan kedua sebesar Rp.1530.000 dan terus meningkat sampai triwulan keempat tahun 2017 sebesar Rp.9.831.000. Pada tahun 2018 triwulan pertama sebesar Rp. 6.371.000 dan terus meningkat sampai triwulan ke empat sebesar Rp.13.262.500. Pada tahun 2019 triwulan pertama sebesar Rp. 7.615.000 dan terus meningkat menjadi Rp.8.966.000 pada triwulan ketiga dan ke empat tahun 2019. Jika melihat perkembangan pajak hiburan pada triwulan ke empat tahun 2015 sebesar Rp. 2.500.000 naik pada triwulan ke empat tahun 2016 sebesar 6.585.000. selanjutnya triwulan kempat tahun 2017 naik menjadi Rp.9.831.000 dan tahun 2018 kembali naik menjadi Rp.13.262.500 namun terjadi penurunan penerimaan pajak hiburan pada tahun 2019 sebesar Rp.8.966.000..

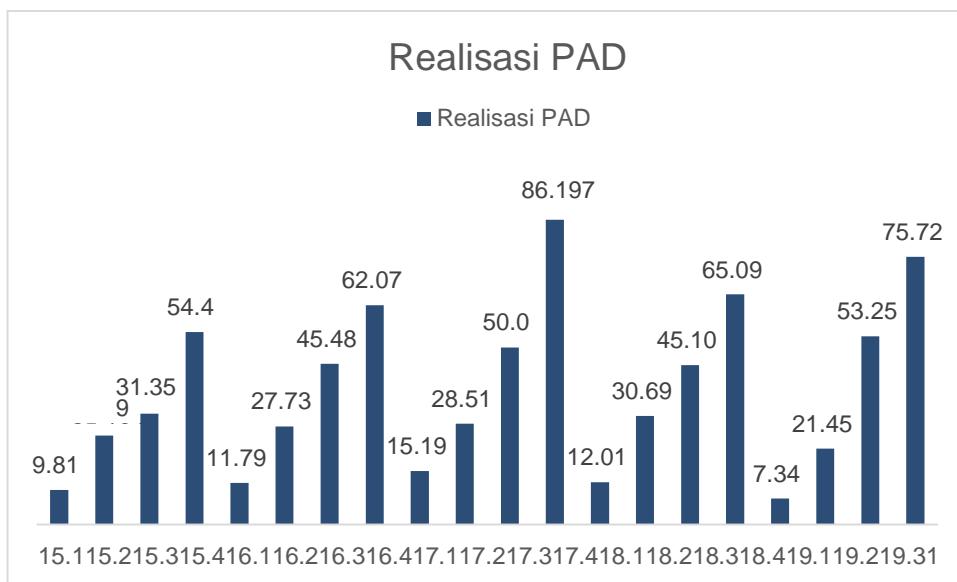
4). Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali perdanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Berdasarkan data statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa penerimaan PAD dari tahun 2015 s/d tahun 2019 dengan nilai terendah 7345.456

atau Rp.7.345.456.000 yaitu penerimaan PAD pada triwulan pertama di bulan Januari tahun 2019. Penerimaan PAD tertinggi sebesar 86197.832 atau Rp.86.197.832.174 yaitu terjadi pada triwulan ke empat tahun 2017. Nilai rata-rata perimaaan pajak restoran selama lima tahun yaitu sebesar 41399.84218 atau Rp.41.399.842.180.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif terssebut dapat dilihat perkembangan penerimaan pajak hotal selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2015 s/d tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.4 dibawah ini



Gambar 4.4
Grafik Perkembangan PAD

Berdasarkan gambar grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak restoran dari tahun 2015 s/d tahun 2019. Pada tahun 2015 triwulan pertama jumlah penerimaan PAD sebesar Rp.9.818.384.552. dan terus meningkat sampai triwulan keempat tahun 2015

sejumlah Rp.54.420.838.966. Penerimaan PAD pada tahun 2016 triwulan pertama sebesar Rp.11.799.250.889. mengalami peningkatan sampai dengan triwulan ke empat sebesar Rp.62.079.454.189. Pada tahun 2017 triwulan pertama sebesar Rp.15.199.765.386. mengalami peningkatan sampai pada triwulan ke empat tahun 2017 sebesar Rp.86.197.832.174. Pada tahun 2018 triwulan pertama sebesar Rp. 12.011.705.447 dan terus meningkat sampai triwulan ke empat sebesar Rp.65.095.212.711. Pada tahun 2019 triwulan pertama sebesar Rp. 7.345.456.000 dan meningkat menjadi Rp.75.724.604.000 pada triwulan ke empat tahun 2019.

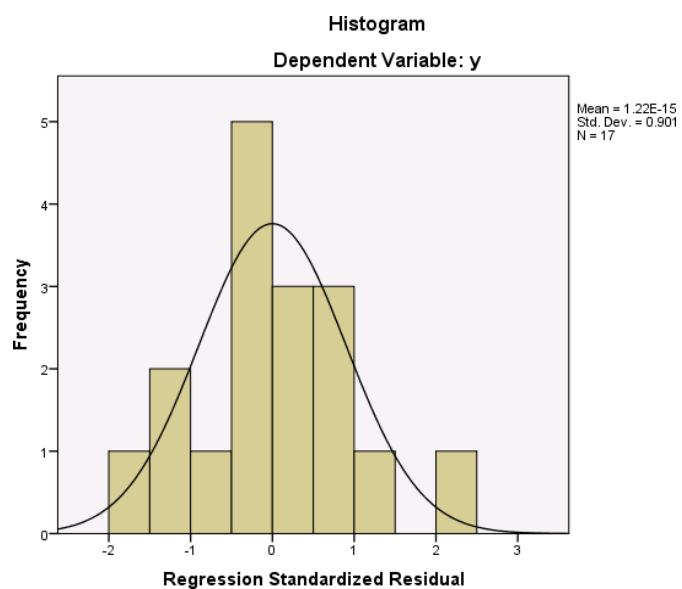
Jika dilihat dari perkembangan PAD berdasarkan total penerimaan pada triwulan keempat dari tahun 2015 s/d tahun 2019 maka terjadi fluktuasi. Triwulan keempat tahun 2015 sebesar Rp.54.420.838.966, naik menjadi Rp.62.079.454.189 pada triwulan keempat tahun 2016. Tahun 2017 triwulan keempat naik menjadi Rp.86.197.832.174, dan selanjutnya triwulan keempat tahun 2018 turun menjadi Rp.65.095.212.711, serta tahun 2019 triwulan kempat kembali naik menjadi Rp.75.724.604.000.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memeroleh model regresi yang memberikan hasil regresi yang baik yaitu *Best Linier Unbiased Estimate* (BLUE). Model regresi dikatakan *BLUE* apabila memenuhi syarat pengujian asumsi dasar klasik dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) diantaranya adalah data terdistribusi secara normal, tidak terdapat autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Berikut ini penjelasan mengenai uji asumsi klasik tersebut sebagai berikut;

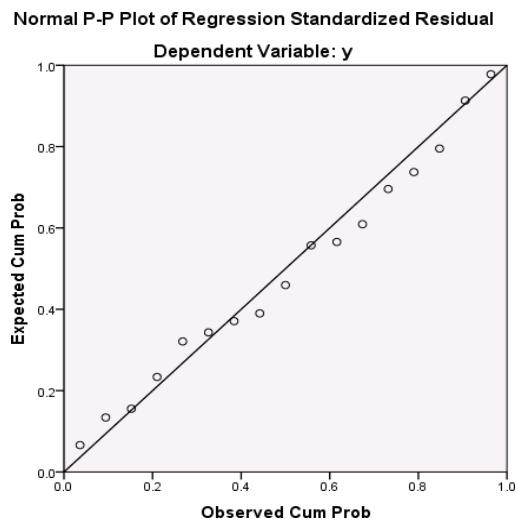
4.3.1 Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berdasarkan normalitas data dengan analisis grafik histogram sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 4.3 menunjukkan pola gambar dari grafik tersebut yang tidak terlalu menceng kekanan atau menceng kekiri yang menunjukkan pola distribusi data adalah normal.



Gambar 4.5.
Hasil pengujian asumsi normalitas Grafik histogram

Uji normalitas data ini dapat dibuktikan dengan uji *normal probability plot residual* sebagaimana tampak pada gambar 4.4 Gambar tersebut menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal di mana terlihat garis observasi mendekati dan mengikuti arah garis diagonalnya.



Gambar 4.6

Hasil pengujian asumsi normalitas Grafik normal P-P Plot Residual

4.3.2 Uji multikolinearitas

Pengujian ini berdasarkan pada model regresi penelitian apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (independen). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance*, dan lawannya nilai *variance inflation factor* (VIF). Multikolonieritas diuji dengan cara membandingkan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Multikolonieritas terjadi apabila nilai *tolerance* < 0.10 dan nilai VIF > 10 . Berikut ini disajikan hasil pengujian multikolinearitas dengan menggunakan program SPSS 17 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini Tabel 4.3 Pengujian Multikolinearitas.

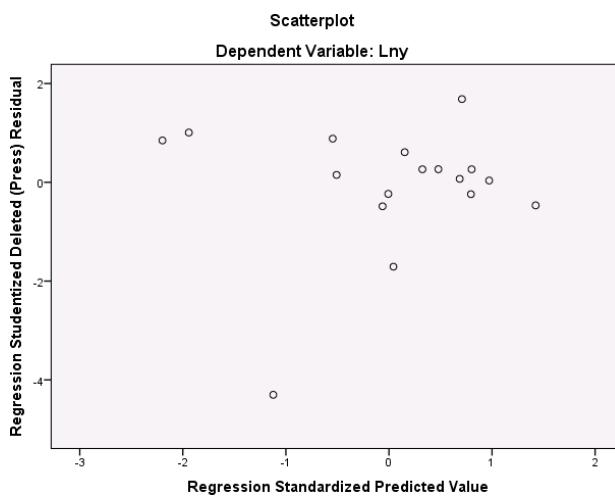
Variabel	Tolerance	VIF
Pajak Hotel.	0.132	7.596
Pajak Restoran	0.177	5.640
Pajak Hiburan	0.477	2.096

Sumber : Hasil Olahan Data dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel uji multikolinearitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi telah lolos uji multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* tidak ada yang di bawah 0.10 dan nilai VIF tidak ada yang di atas 10.

4.3.3 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini menggunakan cara, yaitu dengan melihat grafik *plot* untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas.



Gambar 4.7

Hasil pengujian *scatterplots*

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji asumsi homoskedastisitas dengan uji grafik *scatterplots* yang menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas), hal ini nampak di mana titik observasi tersebar secara acak di sekitar titik-titik nol pada sumbu Y.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya yang berbeda waktunya. Atau dengan kata lain autokorelasi ini akan menguji korelasi nilai residual satu pengamatan dengan residual pengamatan lainnya. Sementara asumsi dari OLS berhubungan dengan masalah residual ini yaitu tidak boleh terjadi adanya korelasi atau hubungan residual satu dengan residual lainnya. Pengujian autokorelasi dapat menggunakan Durbin Watson dengan melakukan perbandingan berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Tingkat Pengujian Autokorelasi

Kesimpulan	Daerah Pengujian
Terdapat autokorelasi positif	$d < d_l$
Ragu ragu	$d_l < d < d_u$
Tidak terdapat autokorelasi	$d_u < d < 4-d_u$
Terdapat autokorelasi negatif	$4-d_l < d$

0,946 dari hasil pengujian autokorelasi diketahui nilai d (durbin watson) pada tabel model summary adalah sebesar 0.946. Jika nilai k (variabel independen) adalah 3, dan n (sampel) adalah 17 dengan tingkat siknifikansi 5% maka didapat nilai tabel durbin watson $d_l = 0,8968$ $d_u = 1,7101$ dengan demikian maka berlaku kondisi $d_l < d < d_u$ ($0,8968 < 0,946 < 1,7101$). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan terdapat autokorelasi ragu-ragu.

Untuk membuktikan dan lebih meyakinkan lagi maka maka perlu

dilakukan pengujian run test terhadap hasil yang masih ragu-ragu tersebut. Hasil pengujian runs test autokorelasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 4.5
Hasil Uji Runs Test

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.03971
Cases < Test Value	8
Cases >= Test Value	9
Total Cases	17
Number of Runs	6
Z	-1.494
Asymp. Sig. (2-tailed)	.135

a. Median

Sumber : Data Olahan SPSS 17

Berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,135 (13,50%) hasil ini jika dibandingkan dengan 0,05 (5%) masih lebih besar nilai Asymp.Sig sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model penelitian ini.

4.4 Analisis Regresi Berganda

Setelah model dalam penelitian ini dinyatakan lolos uji asumsi klasik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi untuk menguji semua hipotesis penelitian. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda karena menggunakan lebih dari satu variabel X yaitu Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Hiburan (X3) dan satu variabel Y yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.4.1 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

4.4.1.1 Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango . Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan triwulan realisasi anggaran pemerintah daerah dengan Periode pengamatan yaitu dimulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2019. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan program SPSS 17 dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

4.4.1.2 Pengujian Hipotesis

1). Uji Koefisien Regresi (uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi pada tabel *anova* dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu pada level $\alpha = 0.05$ (5%).

Tabel 4.6

Pengujian Koefisien Regresi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.005	3	2.335	22.537	.000 ^b
	Residual	1.347	13	.104		
	Total	8.351	16			

a. Dependent Variable: Lny

b. Predictors: (Constant), Lnx3, Lnx2, Lnx1

Sumber : Data Olahan SPSS 17

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel di atas menunjukkan

hasil perhitungan statistik pada tabel anova dengan nilai sig sebesar 0.000 (0,0%) masih lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai sig yang ditetapkan yaitu 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (nilai sig pada tabel anova < dari nilai alpha 5%). Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2). Uji Perkiraan Ketepatan Model (*goodness of fit test*).

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness of fit* dari model regresi, yaitu seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian tersebut disajikan pada tabel *model summary* berikut ini;

Tabel 4.7

Pengujian *goodness of fit test*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.916 ^a	.839	.802	.32187	.946

a. Predictors: (Constant), Lnx3, Lnx2, Lnx1

b. Dependent Variable: Lny

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa nilai *R square* adalah sebesar 0,839 atau 83,90%. Hasil ini berarti bahwa besarnya kontribusi variabel independen pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan yang dapat disumbangkan

untuk perubahan variasi variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 0,839 atau 83,90%, dan sisanya sebesar 0,161 atau 16,10% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Nilai R (korelasi) sebesar 0,916 atau 91,60% dengan kategori sangat kuat, sebagaimana ditunjukkan pada tabel interpretasi koefisien korelasi dibawah ini.

Tabel 4.8
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai R

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,00	Sangat kuat
0,60 – 0,79	Kuat
0,40 – 0,59	Cukup kuat
0,20 – 0,39	Rendah
0,00 – 0,19	Sangat rendah

Sumber : Ridwan (2012)

3). Uji parsial (Uji T)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji-t. Hasil perhitungan statistik pada pengujian parsial ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9
Pengujian Hipotesis Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	4.083	1.169		3.493	.004		
1 Lnx1	-.184	.272	-.207	-.676	.511	.132	7.596
Lnx2	1.157	.250	1.222	4.620	.000	.177	5.640
Lnx3	-.302	.162	-.301	-1.866	.085	.477	2.096

a. Dependent Variable: Lny

Sumber : Data Olahan SPSS 17

Nilai Pajak hotel (Lnx1) pada tabel *coefficients* menunjukkan nilai sig sebesar 0,511 (51,10%) yang berarti $>$ dari nilai α 0.05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan nilai koefisien beta menunjukkan arah negatif sebesar -0.184. Mengacu pada hipotesis yang diajukan di mana Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua yang diajukan tersebut.

Nilai Pajak restoran (Lnx2) pada tabel *coefficients* menunjukkan nilai sig sebesar 0,000 (0%) yang berarti $<$ dari nilai α 0.05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan nilai koefisien beta menunjukkan arah positif sebesar 1.157. Mengacu pada hipotesis yang diajukan di mana Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang diajukan tersebut.

Nilai Pajak hiburan (Lnx3) pada tabel *coefficients* menunjukkan nilai sig

sebesar 0,085 (8,50%) yang berarti > dari nilai α 0.05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan nilai koefisien beta menunjukkan arah negatif sebesar -0.302. Mengacu pada hipotesis yang diajukan di mana Pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menolak hipotesis keempat yang diajukan tersebut.

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel fluktuasi suku bunga BI *rate* terhadap profitabilitas (ROA) maka dapat dijelaskan dalam persamaan analisis regresi sederhana berikut ini:

$$Y = 4,083 - 0,184 + 1,157 - 0,302 \text{ dengan } R^2 = 0,839$$

1. Nilai konstanta sebesar 4,083 satuan artinya apabila variabel bebas diasumsikan bernilai nol, maka tingkat PAD sebesar 4,083 satuan jika variabel lain dianggap konstan.
2. Koefisien regresi variabel Pajak Hotel (X1) adalah sebesar -0,184 satuan. Hasil ini menunjukkan apabila variabel Pajak Hotel (X1) meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD turun sebesar -0,184 satuan.
3. Koefisien regresi variabel Pajak Restoran (X2) adalah sebesar 1,157 satuan. Hasil ini menunjukkan apabila variabel Pajak Restoran (X1) meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD naik sebesar 1,157 satuan.
4. Koefisien regresi variabel Pajak Hiburan (X3) adalah sebesar -0,302 satuan. Hasil ini menunjukkan apabila variabel Pajak hiburan (X1) meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD turun sebesar -0,302 satuan.

5. Nilai R^2 sebesar 0,839 atau (83,90%) menunjukkan besarnya pengaruh variasi variabel independen berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan terhadap PAD sedangkan sisanya sebesar 0,161 atau 16,10% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

4.5 Pembahasan hasil penelitian

4.5.1 Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kontribusi variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap PAD sebesar 83,90% dan sisanya sebesar 16,10% dipengaruh oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti Pajak Bumi dan Bangunan. Nilai korelasi (r) sebesar 91,60%, hasil ini termasuk dalam kategori sangat kuat artinya Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil analisis data statistik pada tabel anova sebagaimana yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Hiburan (X2), dan Pajak Restoran (X3) berpengaruh positif dan signifika terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan demikian hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Kontribusi secara simultan adalah sebesar 83,90% yang menunjukkan bahwa peran dari pajak daerah di Kabupaten Bone Bolango sangat berkorelasi besar terhadap peningkatan PAD. Dengan demikian peran dari Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan untuk terus meningkatkan penerimaan pajak daerah tersebut yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyani Lewasari (2019) bahwa secara simultan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara serempak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung tahun 2003 sampai dengan tahun 2017. Pajak hotel pajak restoran dan pajak hiburan telah banyak memberikan manfaat pada pembangunan ekonomi Kota Bandar Lampung.

4.5.2 Pajak Hotel Berpengaruh Negatif dan Tidak Signifikan terhadap PAD.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai Pajak hotel (X1) pada tabel *coefficients* menunjukkan nilai sig sebesar 0,511 (51,10%) yang berarti $>$ dari nilai α 0.05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan nilai koefisien beta menunjukkan arah negatif sebesar -0.184. Mengacu pada hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua yang diajukan tersebut. Koefisien regresi variabel Pajak Hotel (X1) adalah sebesar -0,184 satuan. Hasil ini menunjukkan apabila variabel Pajak Hotel (X1) meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD turun sebesar -0,184 satuan.

Analisis deskriptif penerimaan pajak hotel per triwulan 1 sampai 4 yang dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan adanya tren yang meningkat dari tahun ketahun terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Bone Bolango. Namun demikian meskipun terjadi tren peningkatan tetapi nilai ini dipandang tidak cukup signifikan terhadap penambahan jumlah PAD dari sektor pajak hotel. Sehingga hasil penelitian ini juga tidak signifikan

terhadap penerimaan PAD. Misalnya penerimaan pajak hotel pada triwulan keempat tahun 2019 sebesar Rp.23.030.000 dimana total realisasi penerimaan PAD sebesar Rp.65.095.212.711. atau hanya sebesar 0,0354% yang dapat disumbangkan oleh pajak hotel terhadap total PAD Kabupaten Bone Bolango..

Meskipun hasil penelitian ini tidak signifikan namun diharapkan agar pemerintah daerah terus meningkatkan potensi penerimaan pajak hotel tersebut mengingat Kabupaten Bone Bolango adalah daerah pemekaran yang terus mengalami peningkatan dari segi pembangunan terutama sarana fisik seperti pembangunan kampus Universitas Negeri Gorontalo yang akan menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat dari usaha hotel, rumah kos dan lain-lainya.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyan Lewasari (2019) bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Bandar Lampung tahun 2003 sampai dengan tahun 2017. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan hotel yang ada di Kabupaten Gorontalo belumlah banyak jika dibandingkan dengan kota Bandar Lampung. Namun demikian jumlah penerimaan ini dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan di mana hasil ini menunjukkan bahwa ada penambahan jumlah hotel dan penginapan yang dibangun di Kabupaten Bone Bolango.

4.5.3 Pajak Restoran Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap PAD.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai Pajak Restoran (X2) pada tabel *coefficients* menunjukkan nilai sig sebesar 0,00 (0%) yang berarti < dari nilai α 0.05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan nilai koefisien beta

menunjukkan arah positif sebesar 1,157. Mengacu pada hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang diajukan tersebut. Koefisien regresi variabel Pajak Restoran (X_1) adalah sebesar 1,157 satuan. Hasil ini menunjukkan apabila variabel Pajak Restoran (X_1) meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD akan naik sebesar 1,157 satuan.

Analisis deskriptif penerimaan pajak restoran per triwulan 1 sampai triwulan ke 4 yang dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan adanya tren yang meningkat dari tahun ke tahun terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bone Bolango. Tren peningkatan pajak restoran sangat signifikan memengaruhi PAD jika dibandingkan dengan pajak hotel yang meskipun terdapat tren kenaikan namun tidak cukup signifikan untuk memengaruhi PAD. Hasil pajak restoran pada triwulan keempat tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1,628,046,000 di mana total realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 75,724,604,000 atau sebesar 2,15% dari total PAD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak restoran merupakan penerimaan pajak yang potensial bagi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dan perlu ditingkatkan penerimanya dari tahun ke tahun.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh Sulistiyan Lewasari (2019), Fikri dan Ronny (2017) bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Bandar Lampung dan PAD Kota Batu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak

restoran sangat berkontribusi besar terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Bone Bolango.

4.5.4 Pajak Hiburan Berpengaruh Negatif dan Tidak Signifikan terhadap PAD.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai Pajak Hiburan (X3) pada tabel *coefficients* menunjukkan nilai sig sebesar 0,085 (8,50%) yang berarti > dari nilai α 0,05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan nilai koefisien beta menunjukkan arah negatif sebesar -0,302. Mengacu pada hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menolak hipotesis keempat yang diajukan tersebut. Koefisien regresi variabel Pajak Hiburan (X3) adalah sebesar -0,302 satuan. Hasil ini menunjukkan apabila variabel Pajak Hiburan (X3) meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD akan turun sebesar 0,302 satuan.

Analisis deskriptif penerimaan pajak restoran per triwulan 1 sampai triwulan ke 4 yang dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan penerimaan pajak hiburan yang fluktuatif di Kabupaten Bone Bolango. Hasil yang fluktuatif menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan yang tidak stabil dan jumlah penerimaan pajak ini tidak memengaruhi penerimaan PAD secara signifikan. Sebagai gambaran dapat dilihat pada penerimaan triwulan keempat tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.966.000 di mana total realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 75,724,604,000 atau sebesar 0,012%

dari total PAD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hiburan bukan merupakan penerimaan pajak yang potensial bagi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dan perlu ditingkatkan lagi penerimaannya dari tahun ke tahun. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyani Lewasari (2019), yang mengemukakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Bandar Lampung.

Pajak hiburan ditentukan dari banyaknya pengunjung atau penonton yang menikmati hiburan. Biasanya pajak hiburan diperoleh dari wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara yang ingin menikmati hiburan yang ada dalam objek wisata tersebut. Dengan demikian kenaikan atau peningkatan pajak hiburan ditentukan oleh jumlah pengunjung objek wisata.

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi wisata yang cukup besar dan dapat dikembangkan menjadi wisata berskala regional dan nasional. Walaupun memiliki potensi wisata yang besar, namun pengelolaan dan pengembangan potensi wisata oleh pemerintah daerah belumlah dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari infrastuktur objek wisata yang rusak dan terabaikan, tempat wisata yang kotor dan kumuh serta kurangnya koordinasi dalam melakukan penataan obyek sarana pariwisata sehingga sarana dan prasarana yang dibuat oleh pengelola pariwisata tidak teratur dan tidak terkontrol dengan baik. Banyaknya potensi pariwisata yang seharusnya mampu menjadi daya tarik dan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah justru tidak optimal untuk dikelola serta terabaikan sehingga potensi penerimaan PAD tidaklah maksimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3), secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2015 s/d 2019. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 83,90% dan sisanya sebesar 16,10% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Dengan demikian hipotesis pertama Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat di terima.
2. Pajak Hotel (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar -0,184 satuan. Dengan demikian hipotesis kedua Pajak Hotel (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di tolak.

3. Pajak Restoran (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar 1,157 satuan. Dengan demikian hipotesis ketiga Pajak Restoran (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di terima.
4. Pajak Hiburan (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar -0,302 satuan. Dengan demikian hipotesis keempat Pajak Hiburan (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di tolak.

5.2 Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diharapkan untuk terus meningkatkan fasilitas fasilitas yang berkaitan dengan penerimaan pajak hiburan yaitu memperbaiki dan menambah fasilitas untuk objek wisata serta membuka peluang wisata lainnya yang potensial seperti wisata pantai dan taman laut. Untuk pajak hotel diharapkan untuk lebih mengoptimalkan lagi penerimaan pajak hotel agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah sampel penelitian ini dan dapat menggunakan sampel PAD secara tahunan dan menambahkan variabel lainnya yang tidak diteliti dan berpengaruh terhadap PAD seperti Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan Retribusi Daerah.

Daftar Pustaka

Damas Dwi Anggoro, 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang

Etty Muyassaroh, 2013. *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta : Medpress Digital

Febri Mandra, 2013. *Analisi Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2000-2011*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/23832/1/Febru%20Mandra%2020106084003601.pdf>) diakses 02 agustus 2017

Fitriana, (2014). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Kota Bandung. E-jurnal ilmu pemerintahan. 1(2).1875-1888.

Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

-----, 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Samudra, (2015)). *Perpajakan Diindonesia*. Jakarta: Rajawali

Sugrisno, Agoes, 2014. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Jakarta : Salemba Empat

Sugianto, 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo)

Sugiyono, 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung :

Alfabeta

Waluyo, 2011. *Akuntansi Pajak*, Eisisi 5. Jakarta : Salemba

Empat

Yoyo Sudaryo, 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yokyakarta : Andi (Anggota IKAPI)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-
undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Umum dan Tata Cara Perpajakan



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 March 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	669.790.005.511,00	0,00	195.054.074.471,99	195.054.074.471,99	(474.735.931.039,01)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	59.547.484.925,00	0,00	9.818.384.552,99	9.818.384.552,99	(49.729.100.372,01)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.000.000.000,00	0,00	965.785.091,00	965.785.091,00	(6.034.214.909,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	80.000.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	(78.450.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	400.000.000,00	0,00	91.014.804,00	91.014.804,00	(308.985.196,00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	25.000.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	(22.750.000,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	50.000.000,00	0,00	542.250,00	542.250,00	(49.457.750,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	2.310.000.000,00	0,00	629.260.386,00	629.260.386,00	(1.680.739.614,00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.500.000.000,00	0,00	192.893.853,00	192.893.853,00	(1.307.106.147,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000.000,00	0,00	17.436.448,00	17.436.448,00	(2.182.563.552,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	435.000.000,00	0,00	30.837.350,00	30.837.350,00	(404.162.650,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.032.750.000,00	0,00	932.208.827,00	932.208.827,00	(2.100.541.173,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	985.000.000,00	0,00	88.993.375,00	88.993.375,00	(896.006.625,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	573.000.000,00	0,00	52.990.000,00	52.990.000,00	(520.010.000,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.474.750.000,00	0,00	790.225.452,00	790.225.452,00	(684.524.548,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	730.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(730.000.000,00)
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	730.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(730.000.000,00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.784.734.925,00	0,00	7.920.390.634,99	7.920.390.634,99	(40.864.344.290,01)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(250.000.000,00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.900.000.000,00	0,00	264.035.599,05	264.035.599,05	(1.635.964.400,95)
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	2.750.000.000,00	0,00	757.743.692,62	757.743.692,62	(1.992.256.307,38)
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.700.000.000,00	0,00	665.750.276,00	665.750.276,00	(2.034.249.724,00)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	75.000.000,00	0,00	26.218.868,00	26.218.868,00	(48.781.132,00)
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	31.800.000.000,00	0,00	5.458.854.434,32	5.458.854.434,32	(26.341.145.565,68)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	287.233.925,00	0,00	66.422.265,00	66.422.265,00	(220.811.660,00)
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.022.501.000,00	0,00	681.365.500,00	681.365.500,00	(8.341.135.500,00)
4.2	DANA PERIMBANGAN	509.892.554.012,00	0,00	164.344.948.696,00	164.344.948.696,00	(345.547.605.316,00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.616.878.012,00	0,00	3.333.641.696,00	3.333.641.696,00	(17.283.236.316,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	19.892.320.252,00	0,00	3.243.091.850,00	3.243.091.850,00	(16.649.228.402,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	724.557.760,00	0,00	90.549.846,00	90.549.846,00	(634.007.914,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	426.858.306.000,00	0,00	142.286.096.000,00	142.286.096.000,00	(284.572.210.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 April s.d 30 June 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	669.790.005.511,00	195.054.074.471,99	184.634.088.441,26	379.688.162.913,25	(290.101.842.597,75)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	59.547.484.925,00	9.818.384.552,99	15.346.547.483,26	25.164.932.036,25	(34.382.552.888,75)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.000.000.000,00	965.785.091,00	1.531.145.483,00	2.496.930.574,00	(4.503.069.426,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	80.000.000,00	1.550.000,00	300.000,00	1.850.000,00	(78.150.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	400.000.000,00	91.014.804,00	155.010.731,00	246.025.535,00	(153.974.465,00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	25.000.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	(22.750.000,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	50.000.000,00	542.250,00	10.879.500,00	11.421.750,00	(38.578.250,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	2.310.000.000,00	629.260.386,00	646.068.338,00	1.275.328.724,00	(1.034.671.276,00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.500.000.000,00	192.893.853,00	105.005.399,00	297.899.252,00	(1.202.100.748,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000.000,00	17.436.448,00	468.581.822,00	486.018.270,00	(1.713.981.730,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	435.000.000,00	30.837.350,00	145.299.693,00	176.137.043,00	(258.862.957,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.032.750.000,00	932.208.827,00	219.679.988,00	1.151.888.815,00	(1.880.861.185,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	985.000.000,00	88.993.375,00	128.815.975,00	217.809.350,00	(767.190.650,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	573.000.000,00	52.990.000,00	27.679.000,00	80.669.000,00	(492.331.000,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.474.750.000,00	790.225.452,00	63.185.013,00	853.410.465,00	(621.339.535,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	730.000.000,00	0,00	451.662.557,00	451.662.557,00	(278.337.443,00)
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	730.000.000,00	0,00	451.662.557,00	451.662.557,00	(278.337.443,00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.784.734.925,00	7.920.390.634,99	13.144.059.455,26	21.064.450.090,25	(27.720.284.834,75)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	250.000.000,00	0,00	336.900.000,00	336.900.000,00	86.900.000,00
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.900.000.000,00	264.035.599,05	362.122.943,79	626.158.542,84	(1.273.841.457,16)
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	2.750.000.000,00	757.743.692,62	1.674.783.751,03	2.432.527.443,65	(317.472.556,35)
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.700.000.000,00	665.750.276,00	165.963.292,00	831.713.568,00	(1.868.286.432,00)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	75.000.000,00	26.218.868,00	10.492.000,00	36.710.868,00	(38.289.132,00)
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	31.800.000.000,00	5.458.854.434,32	7.836.983.332,44	13.295.837.766,76	(18.504.162.233,24)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	287.233.925,00	66.422.265,00	121.923.636,00	188.345.901,00	(98.888.024,00)
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.022.501.000,00	681.365.500,00	2.634.890.500,00	3.316.256.000,00	(5.706.245.000,00)
4.2	DANA PERIMBANGAN	509.892.554.012,00	164.344.948.696,00	130.799.496.300,00	295.144.444.996,00	(214.748.109.016,00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.616.878.012,00	3.333.641.696,00	4.697.112.300,00	8.030.753.996,00	(12.586.124.016,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	19.892.320.252,00	3.243.091.850,00	3.448.589.350,00	6.691.681.200,00	(13.200.639.052,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	724.557.760,00	90.549.846,00	1.248.522.950,00	1.339.072.796,00	614.515.036,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	426.858.306.000,00	142.286.096.000,00	106.714.572.000,00	249.000.668.000,00	(177.857.638.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 July s.d 30 September 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	669.790.005.511,00	379.688.162.913,25	176.214.221.134,62	555.902.384.047,87	(113.887.621.463,13)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	59.547.484.925,00	25.164.932.036,25	6.194.610.970,62	31.359.543.006,87	(28.187.941.918,13)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.000.000.000,00	2.496.930.574,00	1.644.780.215,00	4.141.710.789,00	(2.858.289.211,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	80.000.000,00	1.850.000,00	2.880.000,00	4.730.000,00	(75.270.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	400.000.000,00	246.025.535,00	134.538.117,00	380.563.652,00	(19.436.348,00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	25.000.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	(22.750.000,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	50.000.000,00	11.421.750,00	10.162.625,00	21.584.375,00	(28.415.625,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	2.310.000.000,00	1.275.328.724,00	651.515.419,00	1.926.844.143,00	(383.155.857,00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.500.000.000,00	297.899.252,00	69.106.461,00	367.005.713,00	(1.132.994.287,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000.000,00	486.018.270,00	647.482.508,00	1.133.500.778,00	(1.066.499.222,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	435.000.000,00	176.137.043,00	129.095.085,00	305.232.128,00	(129.767.872,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.032.750.000,00	1.151.888.815,00	213.093.389,00	1.364.982.204,00	(1.667.767.796,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	985.000.000,00	217.809.350,00	101.494.500,00	319.303.850,00	(665.696.150,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	573.000.000,00	80.669.000,00	24.737.000,00	105.406.000,00	(467.594.000,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.474.750.000,00	853.410.465,00	86.861.889,00	940.272.354,00	(534.477.646,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	730.000.000,00	451.662.557,00	0,00	451.662.557,00	(278.337.443,00)
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	730.000.000,00	451.662.557,00	0,00	451.662.557,00	(278.337.443,00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.784.734.925,00	21.064.450.090,25	4.336.737.366,62	25.401.187.456,87	(23.383.547.468,13)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	250.000.000,00	336.900.000,00	71.293.600,00	408.193.600,00	158.193.600,00
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.900.000.000,00	626.158.542,84	255.624.090,73	881.782.633,57	(1.018.217.366,43)
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	2.750.000.000,00	2.432.527.443,65	1.868.140.260,89	4.300.667.704,54	1.550.667.704,54
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.700.000.000,00	831.713.568,00	235.804.495,00	1.067.518.063,00	(1.632.481.937,00)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	75.000.000,00	36.710.868,00	10.444.200,00	47.155.068,00	(27.844.932,00)
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	31.800.000.000,00	13.295.837.766,76	0,00	13.295.837.766,76	(18.504.162.233,24)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	287.233.925,00	188.345.901,00	65.602.720,00	253.948.621,00	(33.285.304,00)
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.022.501.000,00	3.316.256.000,00	1.829.828.000,00	5.146.084.000,00	(3.876.417.000,00)
4.2	DANA PERIMBANGAN	509.892.554.012,00	295.144.444.996,00	131.021.213.250,00	426.165.658.246,00	(83.726.895.766,00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.616.878.012,00	8.030.753.996,00	5.550.176.250,00	13.580.930.246,00	(7.035.947.766,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	19.892.320.252,00	6.691.681.200,00	4.631.546.100,00	11.323.227.300,00	(8.569.092.952,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	724.557.760,00	1.339.072.796,00	918.630.150,00	2.257.702.946,00	1.533.145.186,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	426.858.306.000,00	249.000.668.000,00	106.714.572.000,00	355.715.240.000,00	(71.143.066.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 October s.d 31 December 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	720.490.832.595,12	555.902.384.047,87	142.078.522.060,63	697.980.906.108,50	(22.509.926.486,62)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	59.547.484.925,00	31.359.543.006,87	23.061.295.959,63	54.420.838.966,50	(5.126.645.958,50)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.150.000.000,00	4.141.710.789,00	1.598.231.768,00	5.739.942.557,00	(1.410.057.443,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	80.000.000,00	4.730.000,00	800.000,00	5.530.000,00	(74.470.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	445.000.000,00	380.563.652,00	199.252.060,00	579.815.712,00	134.815.712,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	25.000.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	(22.750.000,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	50.000.000,00	21.584.375,00	4.773.250,00	26.357.625,00	(23.642.375,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	2.400.000.000,00	1.926.844.143,00	632.421.330,00	2.559.265.473,00	159.265.473,00
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.500.000.000,00	367.005.713,00	429.547.954,00	796.553.667,00	(703.446.333,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000.000,00	1.133.500.778,00	132.072.274,00	1.265.573.052,00	(934.426.948,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	450.000.000,00	305.232.128,00	199.364.900,00	504.597.028,00	54.597.028,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.039.750.000,00	1.364.982.204,00	330.271.900,00	1.695.254.104,00	(1.344.495.896,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	545.000.000,00	319.303.850,00	122.244.250,00	441.548.100,00	(103.451.900,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	563.000.000,00	105.406.000,00	114.670.000,00	220.076.000,00	(342.924.000,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.931.750.000,00	940.272.354,00	93.357.650,00	1.033.630.004,00	(898.119.996,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	450.000.000,00	451.662.557,00	0,00	451.662.557,00	1.662.557,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	450.000.000,00	451.662.557,00	0,00	451.662.557,00	1.662.557,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.907.734.925,00	25.401.187.456,87	21.132.792.291,63	46.533.979.748,50	(2.373.755.176,50)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	376.000.000,00	408.193.600,00	2.500.000,00	410.693.600,00	34.693.600,00
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	881.782.633,57	325.039.842,78	1.206.822.476,35	206.822.476,35
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.650.000.000,00	4.300.667.704,54	1.750.082.456,18	6.050.750.160,72	2.400.750.160,72
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.700.000.000,00	1.067.518.063,00	936.995.203,00	2.004.513.266,00	(695.486.734,00)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	75.000.000,00	47.155.068,00	35.544.951,00	82.700.019,00	7.700.019,00
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	31.800.000.000,00	13.295.837.766,76	14.831.027.127,67	28.126.864.894,43	(3.673.135.105,57)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	284.233.925,00	253.948.621,00	77.292.711,00	331.241.332,00	47.007.407,00
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.022.501.000,00	5.146.084.000,00	3.174.310.000,00	8.320.394.000,00	(702.107.000,00)
4.2	DANA PERIMBANGAN	528.901.305.461,12	426.165.658.246,00	87.635.615.000,00	513.801.273.246,00	(15.100.032.215,12)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.017.139.461,12	13.580.930.246,00	857.137.000,00	14.438.067.246,00	(12.579.072.215,12)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	21.361.881.701,12	11.323.227.300,00	857.137.000,00	12.180.364.300,00	(9.181.517.401,12)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.655.257.760,00	2.257.702.946,00	0,00	2.257.702.946,00	(3.397.554.814,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	426.858.306.000,00	355.715.240.000,00	71.143.066.000,00	426.858.306.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 March 2016

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	882.226.435.586,00	0,00	200.619.815.922,40	200.619.815.922,40	(681.606.619.663,60)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	59.547.484.925,00	0,00	11.799.250.889,40	11.799.250.889,40	(47.748.234.035,60)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.150.000.000,00	0,00	1.456.473.995,00	1.456.473.995,00	(5.693.526.005,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	80.000.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	(77.350.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	445.000.000,00	0,00	132.020.289,00	132.020.289,00	(312.979.711,00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(25.000.000,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	50.000.000,00	0,00	8.165.000,00	8.165.000,00	(41.835.000,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	2.400.000.000,00	0,00	646.334.333,00	646.334.333,00	(1.753.665.667,00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.500.000.000,00	0,00	453.785.372,00	453.785.372,00	(1.046.214.628,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000.000,00	0,00	34.885.283,00	34.885.283,00	(2.165.114.717,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	450.000.000,00	0,00	178.633.718,00	178.633.718,00	(271.366.282,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.039.750.000,00	0,00	337.335.954,00	337.335.954,00	(2.702.414.046,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	545.000.000,00	0,00	99.705.650,00	99.705.650,00	(445.294.350,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	563.000.000,00	0,00	74.511.000,00	74.511.000,00	(488.489.000,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.931.750.000,00	0,00	163.119.304,00	163.119.304,00	(1.768.630.696,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(450.000.000,00)
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(450.000.000,00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.907.734.925,00	0,00	10.005.440.940,40	10.005.440.940,40	(38.902.293.984,60)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	376.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(376.000.000,00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	0,00	486.432.028,40	486.432.028,40	(513.567.971,60)
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.650.000.000,00	0,00	493.612.648,00	493.612.648,00	(3.156.387.352,00)
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.700.000.000,00	0,00	134.590.126,82	134.590.126,82	(2.565.409.873,18)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	75.000.000,00	0,00	24.764.400,00	24.764.400,00	(50.235.600,00)
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	31.800.000.000,00	0,00	7.384.933.583,00	7.384.933.583,00	(24.415.066.417,00)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	284.233.925,00	0,00	64.054.654,18	64.054.654,18	(220.179.270,82)
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.022.501.000,00	0,00	1.417.053.500,00	1.417.053.500,00	(7.605.447.500,00)
4.2	DANA PERIMBANGAN	636.123.428.012,00	0,00	186.295.316.479,00	186.295.316.479,00	(449.828.111.533,00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.616.878.012,00	0,00	4.068.988.479,00	4.068.988.479,00	(16.547.889.533,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	15.892.320.252,00	0,00	3.374.019.329,00	3.374.019.329,00	(12.518.300.923,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.724.557.760,00	0,00	694.969.150,00	694.969.150,00	(4.029.588.610,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	495.957.190.000,00	0,00	165.319.056.000,00	165.319.056.000,00	(330.638.134.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 April s.d 30 June 2016

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	882.226.435.586,00	200.619.815.922,40	252.110.240.508,00	452.730.056.430,40	(429.496.379.155,60)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	59.547.484.925,00	11.799.250.889,40	15.940.622.965,00	27.739.873.854,40	(31.807.611.070,60)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.150.000.000,00	1.456.473.995,00	1.426.518.914,00	2.882.992.909,00	(4.267.007.091,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	80.000.000,00	2.650.000,00	1.000.000,00	3.650.000,00	(76.350.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	445.000.000,00	132.020.289,00	221.242.588,00	353.262.877,00	(91.737.123,00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(25.000.000,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	50.000.000,00	8.165.000,00	7.737.000,00	15.902.000,00	(34.098.000,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	2.400.000.000,00	646.334.333,00	698.139.964,00	1.344.474.297,00	(1.055.525.703,00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.500.000.000,00	453.785.372,00	49.301.911,00	503.087.283,00	(996.912.717,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000.000,00	34.885.283,00	334.557.908,00	369.443.191,00	(1.830.556.809,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	450.000.000,00	178.633.718,00	114.539.543,00	293.173.261,00	(156.826.739,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.039.750.000,00	337.335.954,00	526.926.738,00	864.262.692,00	(2.175.487.308,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	545.000.000,00	99.705.650,00	123.570.950,00	223.276.600,00	(321.723.400,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	563.000.000,00	74.511.000,00	60.371.000,00	134.882.000,00	(428.118.000,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.931.750.000,00	163.119.304,00	342.984.788,00	506.104.092,00	(1.425.645.908,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(450.000.000,00)
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(450.000.000,00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.907.734.925,00	10.005.440.940,40	13.987.177.313,00	23.992.618.253,40	(24.915.116.671,60)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	376.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(376.000.000,00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	486.432.028,40	590.017.569,00	1.076.449.597,40	76.449.597,40
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.650.000.000,00	493.612.648,00	2.168.370.128,00	2.661.982.776,00	(988.017.224,00)
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.700.000.000,00	134.590.126,82	353.435.877,39	488.026.004,21	(2.211.973.995,79)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	75.000.000,00	24.764.400,00	13.449.700,00	38.214.100,00	(36.785.900,00)
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	31.800.000.000,00	7.384.933.583,00	8.578.776.850,00	15.963.710.433,00	(15.836.289.567,00)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	284.233.925,00	64.054.654,18	35.745.188,61	99.799.842,79	(184.434.082,21)
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.022.501.000,00	1.417.053.500,00	2.247.382.000,00	3.664.435.500,00	(5.358.065.500,00)
4.2	DANA PERIMBANGAN	636.123.428.012,00	186.295.316.479,00	169.152.631.239,00	355.447.947.718,00	(280.675.480.294,00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.616.878.012,00	4.068.988.479,00	3.719.405.239,00	7.788.393.718,00	(12.828.484.294,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	15.892.320.252,00	3.374.019.329,00	3.619.391.850,00	6.993.411.179,00	(8.898.909.073,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.724.557.760,00	694.969.150,00	100.013.389,00	794.982.539,00	(3.929.575.221,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	495.957.190.000,00	165.319.056.000,00	123.989.292.000,00	289.308.348.000,00	(206.648.842.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 July s.d 30 September 2016

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	904.291.736.146,00	452.730.056.430,40	176.312.099.845,64	629.042.156.276,04	(275.249.579.869,96)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	59.547.484.925,00	27.739.873.854,40	17.745.977.374,64	45.485.851.229,04	(14.061.633.695,96)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.150.000.000,00	2.882.992.909,00	2.013.044.745,00	4.896.037.654,00	(2.253.962.346,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	80.000.000,00	3.650.000,00	2.350.000,00	6.000.000,00	(74.000.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	445.000.000,00	353.262.877,00	244.327.685,00	597.590.562,00	152.590.562,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	25.000.000,00	0,00	5.310.000,00	5.310.000,00	(19.690.000,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	50.000.000,00	15.902.000,00	16.147.125,00	32.049.125,00	(17.950.875,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	2.400.000.000,00	1.344.474.297,00	755.353.309,00	2.099.827.606,00	(300.172.394,00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.500.000.000,00	503.087.283,00	131.339.859,00	634.427.142,00	(865.572.858,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000.000,00	369.443.191,00	749.686.872,00	1.119.130.063,00	(1.080.869.937,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	450.000.000,00	293.173.261,00	108.529.895,00	401.703.156,00	(48.296.844,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.039.750.000,00	864.262.692,00	431.601.100,00	1.295.863.792,00	(1.743.886.208,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	545.000.000,00	223.276.600,00	123.577.140,00	346.853.740,00	(198.146.260,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	563.000.000,00	134.882.000,00	95.606.000,00	230.488.000,00	(332.512.000,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.931.750.000,00	506.104.092,00	212.417.960,00	718.522.052,00	(1.213.227.948,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	450.000.000,00	0,00	515.533.098,00	515.533.098,00	65.533.098,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	450.000.000,00	0,00	515.533.098,00	515.533.098,00	65.533.098,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.907.734.925,00	23.992.618.253,40	14.785.798.431,64	38.778.416.685,04	(10.129.318.239,96)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	376.000.000,00	0,00	468.795.000,00	468.795.000,00	92.795.000,00
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.076.449.597,40	211.167.747,64	1.287.617.345,04	287.617.345,04
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.650.000.000,00	2.661.982.776,00	2.148.915.957,00	4.810.898.733,00	1.160.898.733,00
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.700.000.000,00	488.026.004,21	635.091.910,90	1.123.117.915,11	(1.576.882.084,89)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	75.000.000,00	38.214.100,00	77.291.500,00	115.505.600,00	40.505.600,00
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	31.800.000.000,00	15.963.710.433,00	8.520.344.715,00	24.484.055.148,00	(7.315.944.852,00)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	284.233.925,00	99.799.842,79	616.270.101,10	716.069.943,89	431.836.018,89
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.022.501.000,00	3.664.435.500,00	2.107.921.500,00	5.772.357.000,00	(3.250.144.000,00)
4.2	DANA PERIMBANGAN	713.422.819.012,00	355.447.947.718,00	153.186.645.728,00	508.634.593.446,00	(204.788.225.566,00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.616.878.012,00	7.788.393.718,00	4.592.167.728,00	12.380.561.446,00	(8.236.316.566,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	15.892.320.252,00	6.993.411.179,00	3.234.619.650,00	10.228.030.829,00	(5.664.289.423,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.724.557.760,00	794.982.539,00	1.357.548.078,00	2.152.530.617,00	(2.572.027.143,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	495.957.190.000,00	289.308.348.000,00	123.989.292.000,00	413.297.640.000,00	(82.659.550.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 October s.d 31 December 2016

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	904.291.736.146,00	629.042.156.276,04	246.596.867.161,37	875.639.023.437,41	(28.652.712.708,59)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	59.547.484.925,00	45.485.851.229,04	16.593.602.960,37	62.079.454.189,41	2.531.969.264,41
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.150.000.000,00	4.896.037.654,00	2.047.294.692,00	6.943.332.346,00	(206.667.654,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	80.000.000,00	6.000.000,00	1.550.000,00	7.550.000,00	(72.450.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	445.000.000,00	597.590.562,00	264.250.458,00	861.841.020,00	416.841.020,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	25.000.000,00	5.310.000,00	1.275.000,00	6.585.000,00	(18.415.000,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	50.000.000,00	32.049.125,00	6.831.500,00	38.880.625,00	(11.119.375,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	2.400.000.000,00	2.099.827.606,00	712.106.181,00	2.811.933.787,00	411.933.787,00
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.500.000.000,00	634.427.142,00	745.711.529,00	1.380.138.671,00	(119.861.329,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000.000,00	1.119.130.063,00	107.999.074,00	1.227.129.137,00	(972.870.863,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	450.000.000,00	401.703.156,00	207.570.950,00	609.274.106,00	159.274.106,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.039.750.000,00	1.295.863.792,00	438.813.778,25	1.734.677.570,25	(1.305.072.429,75)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	545.000.000,00	346.853.740,00	159.964.500,00	506.818.240,00	(38.181.760,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	563.000.000,00	230.488.000,00	102.148.000,00	332.636.000,00	(230.364.000,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.931.750.000,00	718.522.052,00	176.701.278,25	895.223.330,25	(1.036.526.669,75)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	450.000.000,00	515.533.098,00	0,00	515.533.098,00	65.533.098,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	450.000.000,00	515.533.098,00	0,00	515.533.098,00	65.533.098,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.907.734.925,00	38.778.416.685,04	14.107.494.490,12	52.885.911.175,16	3.978.176.250,16
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	376.000.000,00	468.795.000,00	0,00	468.795.000,00	92.795.000,00
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.287.617.345,04	335.906.262,00	1.623.523.607,04	623.523.607,04
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.650.000.000,00	4.810.898.733,00	1.405.584.100,00	6.216.482.833,00	2.566.482.833,00
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.700.000.000,00	1.123.117.915,11	279.804.840,00	1.402.922.755,11	(1.297.077.244,89)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	75.000.000,00	115.505.600,00	98.425.498,00	213.931.098,00	138.931.098,00
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	31.800.000.000,00	24.484.055.148,00	8.121.009.446,37	32.605.064.594,37	805.064.594,37
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	284.233.925,00	716.069.943,89	868.221.289,75	1.584.291.233,64	1.300.057.308,64
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.022.501.000,00	5.772.357.000,00	2.998.543.054,00	8.770.900.054,00	(251.600.946,00)
4.2	DANA PERIMBANGAN	713.422.819.012,00	508.634.593.446,00	170.744.317.974,00	679.378.911.420,00	(34.043.907.592,00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.616.878.012,00	12.380.561.446,00	5.584.979.212,00	17.965.540.658,00	(2.651.337.354,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	15.892.320.252,00	10.228.030.829,00	5.453.840.160,00	15.681.870.989,00	(210.449.263,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.724.557.760,00	2.152.530.617,00	131.139.052,00	2.283.669.669,00	(2.440.888.091,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	495.957.190.000,00	413.297.640.000,00	82.659.550.000,00	495.957.190.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 March 2017

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	869.003.630.134,00	0,00	209.690.366.882,00	209.690.366.882,00	(659.313.263.252,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	73.857.734.925,00	0,00	15.199.765.386,00	15.199.765.386,00	(58.657.969.539,00)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.600.000.000,00	0,00	1.343.216.255,00	1.343.216.255,00	(8.256.783.745,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	25.000.000,00	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	(21.940.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	0,00	114.133.583,00	114.133.583,00	(885.866.417,00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	75.000.000,00	0,00	3.569.500,00	3.569.500,00	(71.430.500,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	3.250.000.000,00	0,00	767.924.187,00	767.924.187,00	(2.482.075.813,00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.250.000.000,00	0,00	305.929.334,00	305.929.334,00	(1.944.070.666,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000.000,00	0,00	42.747.301,00	42.747.301,00	(2.157.252.699,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	750.000.000,00	0,00	105.852.350,00	105.852.350,00	(644.147.650,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.900.000.000,00	0,00	310.107.200,00	310.107.200,00	(5.589.892.800,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.575.000.000,00	0,00	56.140.750,00	56.140.750,00	(1.518.859.250,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.430.000.000,00	0,00	79.973.000,00	79.973.000,00	(2.350.027.000,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.895.000.000,00	0,00	173.993.450,00	173.993.450,00	(1.721.006.550,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	500.000.000,00	0,00	793.174.405,00	793.174.405,00	293.174.405,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	500.000.000,00	0,00	793.174.405,00	793.174.405,00	293.174.405,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.857.734.925,00	0,00	12.753.267.526,00	12.753.267.526,00	(45.104.467.399,00)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(450.000.000,00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	0,00	500.129.840,00	500.129.840,00	(499.870.160,00)
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.850.000.000,00	0,00	758.528.676,00	758.528.676,00	(3.091.471.324,00)
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.700.000.000,00	0,00	21.265.221,00	21.265.221,00	(2.678.734.779,00)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	75.000.000,00	0,00	19.129.848,00	19.129.848,00	(55.870.152,00)
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	40.000.000.000,00	0,00	8.001.632.599,00	8.001.632.599,00	(31.998.367.401,00)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	760.233.925,00	0,00	624.817.908,00	624.817.908,00	(135.416.017,00)
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.022.501.000,00	0,00	1.382.166.000,00	1.382.166.000,00	(7.640.335.000,00)
4.1.4.24	Dana BOS	0,00	0,00	1.445.597.434,00	1.445.597.434,00	1.445.597.434,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	636.367.073.000,00	0,00	184.217.557.235,00	184.217.557.235,00	(452.149.515.765,00)
4.2.4	Dana Transfer Umum	510.601.796.000,00	0,00	168.090.327.235,00	168.090.327.235,00	(342.511.468.765,00)
4.2.4.01	Dana Bagi Hasil	14.644.606.000,00	0,00	2.771.271.235,00	2.771.271.235,00	(11.873.334.765,00)
4.2.4.02	Dana Alokasi Umum	495.957.190.000,00	0,00	165.319.056.000,00	165.319.056.000,00	(330.638.134.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 April s.d 30 June 2017

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	869.003.630.134,00	209.690.366.882,00	233.454.303.161,00	443.144.670.043,00	(425.858.960.091,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	73.857.734.925,00	15.199.765.386,00	13.315.527.761,00	28.515.293.147,00	(45.342.441.778,00)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.600.000.000,00	1.343.216.255,00	1.864.086.064,00	3.207.302.319,00	(6.392.697.681,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	25.000.000,00	3.060.000,00	2.150.000,00	5.210.000,00	(19.790.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	114.133.583,00	224.359.754,00	338.493.337,00	(661.506.663,00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	50.000.000,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	(48.470.000,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	75.000.000,00	3.569.500,00	8.640.500,00	12.210.000,00	(62.790.000,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	3.250.000.000,00	767.924.187,00	855.527.741,00	1.623.451.928,00	(1.626.548.072,00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.250.000.000,00	305.929.334,00	299.106.768,00	605.036.102,00	(1.644.963.898,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000.000,00	42.747.301,00	324.229.191,00	366.976.492,00	(1.833.023.508,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	750.000.000,00	105.852.350,00	148.542.110,00	254.394.460,00	(495.605.540,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.900.000.000,00	310.107.200,00	297.273.519,00	607.380.719,00	(5.292.619.281,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.575.000.000,00	56.140.750,00	95.065.650,00	151.206.400,00	(1.423.793.600,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.430.000.000,00	79.973.000,00	107.447.500,00	187.420.500,00	(2.242.579.500,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.895.000.000,00	173.993.450,00	94.760.369,00	268.753.819,00	(1.626.246.181,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	500.000.000,00	793.174.405,00	0,00	793.174.405,00	293.174.405,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	500.000.000,00	793.174.405,00	0,00	793.174.405,00	293.174.405,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.857.734.925,00	12.753.267.526,00	11.154.168.178,00	23.907.435.704,00	(33.950.299.221,00)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(450.000.000,00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	500.129.840,00	644.913.040,00	1.145.042.880,00	145.042.880,00
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.850.000.000,00	758.528.676,00	1.810.472.461,00	2.569.001.137,00	(1.280.998.863,00)
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.700.000.000,00	21.265.221,00	34.262.900,00	55.528.121,00	(2.644.471.879,00)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	75.000.000,00	19.129.848,00	174.034.415,00	193.164.263,00	118.164.263,00
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	40.000.000.000,00	8.001.632.599,00	5.838.142.030,00	13.839.774.629,00	(26.160.225.371,00)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	760.233.925,00	624.817.908,00	671.085.746,00	1.295.903.654,00	535.669.729,00
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.022.501.000,00	1.382.166.000,00	1.981.257.586,00	3.363.423.586,00	(5.659.077.414,00)
4.1.4.24	Dana BOS	0,00	1.445.597.434,00	0,00	1.445.597.434,00	1.445.597.434,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	636.367.073.000,00	184.217.557.235,00	147.214.292.100,00	331.431.849.335,00	(304.935.223.665,00)
4.2.4	Dana Transfer Umum	510.601.796.000,00	168.090.327.235,00	127.629.040.750,00	295.719.367.985,00	(214.882.428.015,00)
4.2.4.01	Dana Bagi Hasil	14.644.606.000,00	2.771.271.235,00	3.639.748.750,00	6.411.019.985,00	(8.233.586.015,00)
4.2.4.02	Dana Alokasi Umum	495.957.190.000,00	165.319.056.000,00	123.989.292.000,00	289.308.348.000,00	(206.648.842.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 July s.d 30 September 2017

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	869.003.630.134,00	443.144.670.043,00	245.508.274.331,20	688.652.944.374,20	(180.350.685.759,80)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	73.857.734.925,00	28.515.293.147,00	21.554.844.049,20	50.070.137.196,20	(23.787.597.728,80)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.600.000.000,00	3.207.302.319,00	3.141.696.208,00	6.348.998.527,00	(3.251.001.473,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	25.000.000,00	5.210.000,00	4.600.000,00	9.810.000,00	(15.190.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	338.493.337,00	240.822.927,00	579.316.264,00	(420.683.736,00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	50.000.000,00	1.530.000,00	960.000,00	2.490.000,00	(47.510.000,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	75.000.000,00	12.210.000,00	8.797.775,00	21.007.775,00	(53.992.225,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	3.250.000.000,00	1.623.451.928,00	956.124.283,00	2.579.576.211,00	(670.423.789,00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.250.000.000,00	605.036.102,00	324.984.773,00	930.020.875,00	(1.319.979.125,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000.000,00	366.976.492,00	1.454.940.387,00	1.821.916.879,00	(378.083.121,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	750.000.000,00	254.394.460,00	150.466.063,00	404.860.523,00	(345.139.477,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.900.000.000,00	607.380.719,00	340.341.836,00	947.722.555,00	(4.952.277.445,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.575.000.000,00	151.206.400,00	90.061.274,00	241.267.674,00	(1.333.732.326,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.430.000.000,00	187.420.500,00	109.997.000,00	297.417.500,00	(2.132.582.500,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.895.000.000,00	268.753.819,00	140.283.562,00	409.037.381,00	(1.485.962.619,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	500.000.000,00	793.174.405,00	0,00	793.174.405,00	293.174.405,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	500.000.000,00	793.174.405,00	0,00	793.174.405,00	293.174.405,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.857.734.925,00	23.907.435.704,00	18.072.806.005,20	41.980.241.709,20	(15.877.493.215,80)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(450.000.000,00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.145.042.880,00	223.821.388,00	1.368.854.268,00	368.864.268,00
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.850.000.000,00	2.569.001.137,00	1.597.502.990,00	4.166.504.127,00	316.504.127,00
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.700.000.000,00	55.528.121,00	335.808.453,00	391.336.574,00	(2.308.663.426,00)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	75.000.000,00	193.164.263,00	98.029.833,00	291.194.096,00	216.194.096,00
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	40.000.000.000,00	13.839.774.629,00	11.938.273.250,00	25.778.047.879,00	(14.221.952.121,00)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	760.233.925,00	1.295.903.654,00	1.403.284.614,00	2.699.188.268,00	1.938.954.343,00
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitalis JKN	9.022.501.000,00	3.363.423.586,00	1.853.373.040,00	5.216.796.626,00	(3.805.704.374,00)
4.1.4.24	Dana BOS	0,00	1.445.597.434,00	622.712.437,20	2.068.309.871,20	2.068.309.871,20
4.2	DANA PERIMBANGAN	636.367.073.000,00	331.431.849.335,00	165.698.440.150,00	497.130.289.485,00	(139.236.783.515,00)
4.2.4	Dana Transfer Umum	510.601.796.000,00	295.719.367.985,00	124.697.172.400,00	420.416.540.385,00	(90.185.255.615,00)
4.2.4.01	Dana Bagi Hasil	14.644.606.000,00	6.411.019.985,00	3.611.997.400,00	10.023.017.385,00	(4.621.588.615,00)
4.2.4.02	Dana Alokasi Umum	495.957.190.000,00	289.308.348.000,00	121.085.175.000,00	410.393.523.000,00	(85.563.667.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 October s.d 31 December 2017

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	896.022.607.946,20	688.652.944.374,20	182.428.811.342,14	871.081.755.716,34	(24.940.852.229,86)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	96.490.717.737,20	50.070.137.196,20	36.127.694.978,14	86.197.832.174,34	(10.292.885.562,86)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.600.000.000,00	6.348.998.527,00	3.123.062.366,00	9.472.060.893,00	(127.939.107,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	25.000.000,00	9.810.000,00	2.450.000,00	12.260.000,00	(12.740.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	579.316.264,00	400.204.748,00	979.521.012,00	(20.478.988,00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	50.000.000,00	2.490.000,00	7.341.000,00	9.831.000,00	(40.169.000,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	75.000.000,00	21.007.775,00	35.529.900,00	56.537.675,00	(18.462.325,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	3.250.000.000,00	2.579.576.211,00	935.454.862,00	3.515.031.073,00	265.031.073,00
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.250.000.000,00	930.020.875,00	1.184.499.069,00	2.114.519.944,00	(135.480.056,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000.000,00	1.821.916.879,00	333.675.363,00	2.155.592.242,00	(44.407.758,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	750.000.000,00	404.860.523,00	223.907.424,00	628.767.947,00	(121.232.053,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.900.000.000,00	947.722.555,00	327.617.675,00	1.275.340.230,00	(4.624.659.770,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.575.000.000,00	241.267.674,00	122.403.925,00	363.671.599,00	(1.211.328.401,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.430.000.000,00	297.417.500,00	122.392.750,00	419.810.250,00	(2.010.189.750,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.895.000.000,00	409.037.381,00	82.821.000,00	491.858.381,00	(1.403.141.619,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	500.000.000,00	793.174.405,00	0,00	793.174.405,00	293.174.405,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	500.000.000,00	793.174.405,00	0,00	793.174.405,00	293.174.405,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.490.717.737,20	41.980.241.709,20	32.677.014.937,14	74.657.256.646,34	(5.833.461.090,86)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	450.000.000,00	0,00	74.295.000,00	74.295.000,00	(375.705.000,00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.368.864.268,00	207.679.168,00	1.576.543.436,00	576.543.436,00
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.850.000.000,00	4.166.504.127,00	1.636.647.187,48	5.803.151.314,48	1.953.151.314,48
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.700.000.000,00	391.336.574,00	776.154.659,47	1.167.491.233,47	(1.532.508.766,53)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	75.000.000,00	291.194.096,00	26.093.943,00	317.288.039,00	242.288.039,00
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	40.000.000.000,00	25.778.047.879,00	6.434.901.185,26	32.212.949.064,26	(7.787.050.935,74)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	760.233.925,00	2.699.188.268,00	1.210.445.938,53	3.909.634.206,53	3.149.400.281,53
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.022.501.000,00	5.216.796.626,00	2.767.042.892,00	7.983.839.518,00	(1.038.661.482,00)
4.1.4.24	Dana BOS	22.632.982.812,20	2.068.309.871,20	19.543.754.963,40	21.612.064.834,60	(1.020.917.977,60)
4.2	DANA PERIMBANGAN	638.403.943.000,00	497.130.289.485,00	131.205.245.553,00	628.335.535.038,00	(10.068.407.962,00)
4.2.4	Dana Transfer Umum	501.889.423.000,00	420.416.540.385,00	77.725.511.048,00	498.142.051.433,00	(3.747.371.567,00)
4.2.4.01	Dana Bagi Hasil	14.644.606.000,00	10.023.017.385,00	874.217.048,00	10.897.234.433,00	(3.747.371.567,00)
4.2.4.02	Dana Alokasi Umum	487.244.817.000,00	410.393.523.000,00	76.851.294.000,00	487.244.817.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 March 2018

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	1.014.399.678.946,00	0,00	247.847.568.096,04	247.847.568.096,04	(766.552.110.849,96)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	80.724.733.925,00	0,00	12.011.705.447,04	12.011.705.447,04	(68.713.028.477,96)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.675.000.000,00	0,00	1.567.362.830,00	1.567.362.830,00	(9.107.637.170,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	25.000.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	(20.200.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	0,00	165.505.588,00	165.505.588,00	(834.494.412,00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	50.000.000,00	0,00	6.371.000,00	6.371.000,00	(43.629.000,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	100.000.000,00	0,00	479.000,00	479.000,00	(99.521.000,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	3.550.000.000,00	0,00	982.643.138,00	982.643.138,00	(2.567.356.862,00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.250.000.000,00	0,00	201.875.483,00	201.875.483,00	(2.048.124.517,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.850.000.000,00	0,00	11.106.957,00	11.106.957,00	(2.838.893.043,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	850.000.000,00	0,00	194.581.664,00	194.581.664,00	(655.418.336,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.150.000.000,00	0,00	251.727.609,00	251.727.609,00	(5.898.272.391,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.875.000.000,00	0,00	57.037.425,00	57.037.425,00	(1.817.962.575,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3.275.000.000,00	0,00	119.428.750,00	119.428.750,00	(3.155.571.250,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	0,00	75.261.434,00	75.261.434,00	(924.738.566,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	750.000.000,00	0,00	1.244.178.967,00	1.244.178.967,00	494.178.967,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	750.000.000,00	0,00	1.244.178.967,00	1.244.178.967,00	494.178.967,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.149.733.925,00	0,00	8.948.436.041,04	8.948.436.041,04	(54.201.297.883,96)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(550.000.000,00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000,00	0,00	197.047.155,00	197.047.155,00	(1.302.952.845,00)
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	5.500.000.000,00	0,00	732.494.067,00	732.494.067,00	(4.767.505.933,00)
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	5.500.000.000,00	0,00	71.599.290,00	71.599.290,00	(5.428.400.710,00)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	250.000.000,00	0,00	26.474.016,00	26.474.016,00	(223.525.984,00)
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	40.000.000.000,00	0,00	6.557.378.341,04	6.557.378.341,04	(33.442.621.658,96)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	827.232.925,00	0,00	31.397.728,00	31.397.728,00	(795.835.197,00)
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.022.501.000,00	0,00	1.332.045.444,00	1.332.045.444,00	(7.690.455.556,00)
4.2	DANA PERIMBANGAN	716.280.479.000,00	0,00	190.066.928.891,00	190.066.928.891,00	(526.213.550.109,00)
4.2.4	Dana Transfer Umum	498.684.989.000,00	0,00	163.947.697.200,00	163.947.697.200,00	(334.737.291.800,00)
4.2.4.01	Dana Bagi Hasil	11.440.172.000,00	0,00	1.532.765.200,00	1.532.765.200,00	(9.907.406.800,00)
4.2.4.02	Dana Alokasi Umum	487.244.817.000,00	0,00	162.414.932.000,00	162.414.932.000,00	(324.829.885.000,00)
4.2.5	Dana Transfer Khusus	217.595.490.000,00	0,00	26.119.231.691,00	26.119.231.691,00	(191.476.258.309,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 April s.d 30 June 2018

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	1.014.399.678.946,00	247.847.568.096,04	251.621.694.369,82	499.469.262.465,86	(514.930.416.480,14)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	80.724.733.925,00	12.011.705.447,04	18.682.182.667,62	30.693.888.114,66	(50.030.845.810,34)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.675.000.000,00	1.567.362.830,00	1.738.770.345,00	3.306.133.175,00	(7.368.866.825,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	25.000.000,00	4.800.000,00	4.670.000,00	9.470.000,00	(15.530.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	165.505.588,00	298.671.231,00	464.176.819,00	(535.823.181,00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	50.000.000,00	6.371.000,00	3.903.000,00	10.274.000,00	(39.726.000,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	100.000.000,00	479.000,00	14.363.750,00	14.842.750,00	(85.157.250,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	3.550.000.000,00	982.643.138,00	980.683.199,00	1.963.326.337,00	(1.586.673.663,00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.250.000.000,00	201.875.483,00	225.280.942,00	427.156.425,00	(1.822.843.575,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.850.000.000,00	11.106.957,00	39.578.294,00	50.685.251,00	(2.799.314.749,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	850.000.000,00	194.581.664,00	171.619.929,00	366.201.593,00	(483.798.407,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.150.000.000,00	251.727.609,00	286.883.926,00	538.611.535,00	(5.611.388.465,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.875.000.000,00	57.037.425,00	150.648.810,00	207.686.235,00	(1.667.313.765,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3.275.000.000,00	119.428.750,00	89.992.000,00	209.420.750,00	(3.065.579.250,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	75.261.434,00	46.243.116,00	121.504.550,00	(878.495.450,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	750.000.000,00	1.244.178.967,00	0,00	1.244.178.967,00	494.178.967,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	750.000.000,00	1.244.178.967,00	0,00	1.244.178.967,00	494.178.967,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.149.733.925,00	8.948.436.041,04	16.656.528.396,62	25.604.964.437,66	(37.544.769.487,34)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(550.000.000,00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000,00	197.047.155,00	211.658.776,00	408.705.931,00	(1.091.294.069,00)
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	5.500.000.000,00	732.494.067,00	1.478.392.586,71	2.210.886.653,71	(3.289.113.346,29)
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	5.500.000.000,00	71.599.290,00	288.336.559,00	359.935.849,00	(5.140.064.151,00)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	250.000.000,00	26.474.016,00	8.567.200,00	35.041.216,00	(214.958.784,00)
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	40.000.000.000,00	6.557.378.341,04	12.695.512.467,91	19.252.890.808,95	(20.747.109.191,05)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	827.232.925,00	31.397.728,00	21.123.722,00	52.521.450,00	(774.711.475,00)
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.022.501.000,00	1.332.045.444,00	1.952.937.085,00	3.284.982.529,00	(5.737.518.471,00)
4.2	DANA PERIMBANGAN	716.280.479.000,00	190.066.928.891,00	172.273.015.050,00	362.339.943.941,00	(353.940.535.059,00)
4.2.4	Dana Transfer Umum	498.684.989.000,00	163.947.697.200,00	124.367.683.300,00	288.315.380.500,00	(210.369.608.500,00)
4.2.4.01	Dana Bagi Hasil	11.440.172.000,00	1.532.765.200,00	2.556.484.300,00	4.089.249.500,00	(7.350.922.500,00)
4.2.4.02	Dana Alokasi Umum	487.244.817.000,00	162.414.932.000,00	121.811.199.000,00	284.226.131.000,00	(203.018.686.000,00)
4.2.5	Dana Transfer Khusus	217.595.490.000,00	26.119.231.691,00	47.905.331.750,00	74.024.563.441,00	(143.570.926.559,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 July s.d 30 September 2018

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	1.014.399.678.946,00	499.469.262.465,86	264.503.001.952,91	763.972.264.418,77	(250.427.414.527,23)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	80.724.733.925,00	30.693.888.114,66	14.410.813.247,11	45.104.701.361,77	(35.620.032.563,23)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.675.000.000,00	3.306.133.175,00	3.229.536.948,00	6.535.670.123,00	(4.139.329.877,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	25.000.000,00	9.470.000,00	5.550.000,00	15.020.000,00	(9.980.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	464.176.819,00	304.239.684,00	768.416.503,00	(231.583.497,00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	50.000.000,00	10.274.000,00	1.312.500,00	11.586.500,00	(38.413.500,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	100.000.000,00	14.842.750,00	14.119.250,00	28.962.000,00	(71.038.000,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	3.550.000.000,00	1.963.326.337,00	985.051.964,00	2.948.378.301,00	(601.621.699,00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.250.000.000,00	427.156.425,00	434.537.447,00	861.693.872,00	(1.388.306.128,00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.850.000.000,00	50.685.251,00	1.275.401.406,00	1.326.086.657,00	(1.523.913.343,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	850.000.000,00	366.201.593,00	209.324.697,00	575.526.290,00	(274.473.710,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.150.000.000,00	538.611.535,00	458.740.015,00	997.351.550,00	(5.152.648.450,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.875.000.000,00	207.686.235,00	101.281.550,00	308.967.785,00	(1.566.032.215,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3.275.000.000,00	209.420.750,00	260.540.650,00	469.961.400,00	(2.805.038.600,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	121.504.550,00	96.917.815,00	218.422.365,00	(781.577.635,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	750.000.000,00	1.244.178.967,00	0,00	1.244.178.967,00	494.178.967,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	750.000.000,00	1.244.178.967,00	0,00	1.244.178.967,00	494.178.967,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.149.733.925,00	25.604.964.437,66	10.722.536.284,11	36.327.500.721,77	(26.822.233.203,23)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(550.000.000,00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000,00	408.705.931,00	126.037.000,00	534.742.931,00	(965.257.069,00)
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	5.500.000.000,00	2.210.886.653,71	1.645.986.537,11	3.856.873.190,82	(1.643.126.809,18)
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	5.500.000.000,00	359.935.849,00	1.361.329.291,00	1.721.265.140,00	(3.778.734.860,00)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	250.000.000,00	35.041.216,00	44.724.004,00	79.765.220,00	(170.234.780,00)
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	40.000.000.000,00	19.252.890.808,95	5.393.898.102,00	24.646.788.910,95	(15.353.211.089,05)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	827.232.925,00	52.521.450,00	223.100.325,00	275.621.775,00	(551.611.150,00)
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.022.501.000,00	3.284.982.529,00	1.927.461.025,00	5.212.443.554,00	(3.810.057.446,00)
4.2	DANA PERIMBANGAN	716.280.479.000,00	362.339.943.941,00	219.093.824.962,00	581.433.768.903,00	(134.846.710.097,00)
4.2.4	Dana Transfer Umum	498.684.989.000,00	288.315.380.500,00	125.513.604.000,00	413.828.984.500,00	(84.856.004.500,00)
4.2.4.01	Dana Bagi Hasil	11.440.172.000,00	4.089.249.500,00	3.702.405.000,00	7.791.654.500,00	(3.648.517.500,00)
4.2.4.02	Dana Alokasi Umum	487.244.817.000,00	284.226.131.000,00	121.811.199.000,00	406.037.330.000,00	(81.207.487.000,00)
4.2.5	Dana Transfer Khusus	217.595.490.000,00	74.024.563.441,00	93.580.220.962,00	167.604.784.403,00	(49.990.705.597,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 October s.d 31 December 2018

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	1.010.552.735.037,00	763.972.264.418,77	211.668.342.093,36	975.640.606.512,13	(34.912.128.524,87)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	80.724.733.925,00	45.104.701.361,77	19.990.511.349,36	65.095.212.711,13	(15.629.521.213,87)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.675.000.000,00	6.535.670.123,00	4.380.153.298,00	10.915.823.421,00	240.823.421,00
4.1.1.01	Pajak Hotel	25.000.000,00	15.020.000,00	8.010.000,00	23.030.000,00	(1.970.000,00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	768.416.503,00	593.043.449,00	1.361.459.952,00	361.459.952,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	50.000.000,00	11.586.500,00	1.676.000,00	13.262.500,00	(36.737.500,00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	100.000.000,00	28.962.000,00	13.353.625,00	42.315.625,00	(57.684.375,00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	3.550.000.000,00	2.948.378.301,00	991.628.099,00	3.940.006.400,00	390.006.400,00
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.250.000.000,00	861.693.872,00	1.394.190.715,00	2.255.884.587,00	5.884.587,00
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.850.000.000,00	1.326.086.657,00	1.175.585.232,00	2.501.671.889,00	(348.328.111,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	850.000.000,00	575.526.290,00	202.666.178,00	778.192.468,00	(71.807.532,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.150.000.000,00	997.351.550,00	441.286.429,50	1.438.637.979,50	(4.711.362.020,50)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.875.000.000,00	308.967.785,00	104.635.500,00	413.603.285,00	(1.461.396.715,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3.275.000.000,00	469.961.400,00	141.889.500,00	611.850.900,00	(2.663.149.100,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	218.422.365,00	194.761.429,50	413.183.794,50	(586.816.205,50)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	750.000.000,00	1.244.178.967,00	0,00	1.244.178.967,00	494.178.967,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	750.000.000,00	1.244.178.967,00	0,00	1.244.178.967,00	494.178.967,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.149.733.925,00	36.327.500.721,77	15.169.071.621,86	51.496.572.343,63	(11.653.161.581,37)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	550.000.000,00	0,00	291.675.000,00	291.675.000,00	(258.325.000,00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000,00	534.742.931,00	176.101.767,80	710.844.698,80	(789.155.301,20)
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	5.500.000.000,00	3.856.873.190,82	1.921.055.225,78	5.777.928.416,60	277.928.416,60
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	5.500.000.000,00	1.721.265.140,00	242.961.316,00	1.964.226.456,00	(3.535.773.544,00)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	250.000.000,00	79.765.220,00	21.659.357,00	101.424.577,00	(148.575.423,00)
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	40.000.000.000,00	24.646.788.910,95	9.772.431.924,78	34.419.220.835,73	(5.580.779.164,27)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	827.232.925,00	275.621.775,00	120.056.768,50	395.678.543,50	(431.554.381,50)
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.022.501.000,00	5.212.443.554,00	2.623.130.262,00	7.835.573.816,00	(1.186.927.184,00)
4.2	DANA PERIMBANGAN	713.145.323.691,00	581.433.768.903,00	117.579.206.785,00	699.012.975.688,00	(14.132.348.003,00)
4.2.4	Dana Transfer Umum	498.684.989.000,00	413.828.984.500,00	83.085.511.995,00	496.914.496.495,00	(1.770.492.505,00)
4.2.4.01	Dana Bagi Hasil	11.440.172.000,00	7.791.654.500,00	1.878.024.995,00	9.669.679.495,00	(1.770.492.505,00)
4.2.4.02	Dana Alokasi Umum	487.244.817.000,00	406.037.330.000,00	81.207.487.000,00	487.244.817.000,00	0,00
4.2.5	Dana Transfer Khusus	214.460.334.691,00	167.604.784.403,00	34.493.694.790,00	202.098.479.193,00	(12.361.855.498,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Maret 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	1,016,945,302,946.00	0.00	233,141,691,028.00	233,141,691,028.00	(783,803,611,918.00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	87,003,452,925.00	0.00	7,345,456,190.00	7,345,456,190.00	(79,657,996,735.00)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13,425,000,000.00	0.00	1,777,836,038.00	1,777,836,038.00	(11,647,163,962.00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	25,000,000.00	0.00	3,959,000.00	3,959,000.00	(21,041,000.00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	2,000,000,000.00	0.00	268,610,249.00	268,610,249.00	(1,731,389,751.00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	50,000,000.00	0.00	7,615,500.00	7,615,500.00	(42,384,500.00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	100,000,000.00	0.00	6,023,000.00	6,023,000.00	(93,977,000.00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	3,900,000,000.00	0.00	1,072,298,116.00	1,072,298,116.00	(2,827,701,884.00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2,500,000,000.00	0.00	176,046,002.00	176,046,002.00	(2,323,953,998.00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3,600,000,000.00	0.00	46,317,280.00	46,317,280.00	(3,553,682,720.00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1,250,000,000.00	0.00	196,966,891.00	196,966,891.00	(1,053,033,109.00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,400,000,000.00	0.00	697,142,854.00	697,142,854.00	(3,702,857,146.00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1,375,000,000.00	0.00	454,823,850.00	454,823,850.00	(920,176,150.00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2,525,000,000.00	0.00	187,564,250.00	187,564,250.00	(2,337,435,750.00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500,000,000.00	0.00	54,754,754.00	54,754,754.00	(445,245,246.00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,000,000,000.00	0.00	1,838,644,385.00	1,838,644,385.00	(161,355,615.00)
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2,000,000,000.00	0.00	1,838,644,385.00	1,838,644,385.00	(161,355,615.00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67,178,452,925.00	0.00	3,031,832,913.00	3,031,832,913.00	(64,146,620,012.00)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000,000.00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1,900,000,000.00	0.00	176,130,787.00	176,130,787.00	(1,723,869,213.00)
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	5,500,000,000.00	0.00	872,010,173.00	872,010,173.00	(4,627,989,827.00)
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	6,150,000,000.00	0.00	269,940,358.08	269,940,358.08	(5,880,059,641.92)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	500,000,000.00	0.00	27,806,093.00	27,806,093.00	(472,193,907.00)
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	41,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(41,000,000,000.00)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	827,232,925.00	0.00	321,541,978.92	321,541,978.92	(505,690,946.08)
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	10,301,220,000.00	0.00	1,364,403,523.00	1,364,403,523.00	(8,936,816,477.00)
4.2	DANA PERIMBANGAN	695,942,726,000.00	0.00	175,620,154,793.00	175,620,154,793.00	(520,322,571,207.00)
4.2.4	Dana Transfer Umum	510,498,451,000.00	0.00	167,444,692,900.00	167,444,692,900.00	(343,053,758,100.00)
4.2.4.01	Dana Bagi Hasil	10,458,414,000.00	0.00	1,352,920,900.00	1,352,920,900.00	(9,105,493,100.00)
4.2.4.02	Dana Alokasi Umum	500,040,037,000.00	0.00	166,091,772,000.00	166,091,772,000.00	(333,948,265,000.00)
4.2.5	Dana Transfer Khusus	185,444,275,000.00	0.00	8,175,461,893.00	8,175,461,893.00	(177,268,813,107.00)
4.2.5.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	99,803,944,000.00	0.00	0.00	0.00	(99,803,944,000.00)
4.2.5.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	85,640,331,000.00	0.00	8,175,461,893.00	8,175,461,893.00	(77,464,869,107.00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	233,999,124,021.00	0.00	50,176,080,045.00	50,176,080,045.00	(183,823,043,976.00)
4.3.1	Pendapatan Hibah	34,641,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(34,641,000,000.00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 April s.d 30 Juni 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	LEBIH/KURANG
4	PENDAPATAN	1,016,945,302,946.00	233,141,691,028.00	240,831,439,973.44	473,973,131,001.44	(542,972,171,944.56)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	87,003,452,925.00	7,345,456,190.00	14,108,983,930.44	21,454,440,120.44	(65,549,012,804.56)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13,425,000,000.00	1,777,836,038.00	2,616,339,451.00	4,394,175,489.00	(9,030,824,511.00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	25,000,000.00	3,959,000.00	8,681,000.00	12,640,000.00	(12,360,000.00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	2,000,000,000.00	268,610,249.00	374,453,568.00	643,063,817.00	(1,356,936,183.00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	50,000,000.00	7,615,500.00	651,000.00	8,266,500.00	(41,733,500.00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	100,000,000.00	6,023,000.00	48,051,040.00	54,074,040.00	(45,925,960.00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	3,900,000,000.00	1,072,298,116.00	1,084,748,100.00	2,157,046,216.00	(1,742,953,784.00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2,500,000,000.00	176,046,002.00	119,839,781.00	295,885,783.00	(2,204,114,217.00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3,600,000,000.00	46,317,280.00	776,610,160.00	822,927,440.00	(2,777,072,560.00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1,250,000,000.00	196,966,891.00	203,304,802.00	400,271,693.00	(849,728,307.00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,400,000,000.00	697,142,854.00	1,534,418,060.00	2,231,560,914.00	(2,168,439,086.00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1,375,000,000.00	454,823,850.00	1,313,637,800.00	1,768,461,650.00	393,461,650.00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2,525,000,000.00	187,564,250.00	142,446,000.00	330,010,250.00	(2,194,989,750.00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500,000,000.00	54,754,754.00	78,334,260.00	133,089,014.00	(366,910,986.00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,000,000,000.00	1,838,644,385.00	0.00	1,838,644,385.00	(161,355,615.00)
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2,000,000,000.00	1,838,644,385.00	0.00	1,838,644,385.00	(161,355,615.00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67,178,452,925.00	3,031,832,913.00	9,958,226,419.44	12,990,059,332.44	(54,188,393,592.56)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000,000.00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1,900,000,000.00	176,130,787.00	182,612,201.40	358,742,988.40	(1,541,257,011.60)
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	5,500,000,000.00	872,010,173.00	1,306,659,397.64	2,178,669,570.64	(3,321,330,429.36)
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	6,150,000,000.00	269,940,358.08	177,380,288.00	447,320,646.08	(5,702,679,353.92)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	500,000,000.00	27,806,093.00	18,751,949.00	46,558,042.00	(453,441,958.00)
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	41,000,000,000.00	0.00	6,023,727,887.00	6,023,727,887.00	(34,976,272,113.00)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	827,232,925.00	321,541,978.92	142,107,515.40	463,649,494.32	(363,583,430.68)
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	10,301,220,000.00	1,364,403,523.00	2,106,987,181.00	3,471,390,704.00	(6,829,829,296.00)
4.2	DANA PERIMBANGAN	695,942,726,000.00	175,620,154,793.00	165,957,330,075.00	341,577,484,868.00	(354,365,241,132.00)
4.2.4	Dana Transfer Umum	510,498,451,000.00	167,444,692,900.00	127,930,050,800.00	295,374,743,700.00	(215,123,707,300.00)
4.2.4.01	Dana Bagi Hasil	10,458,414,000.00	1,352,920,900.00	2,478,869,800.00	3,831,790,700.00	(6,626,623,300.00)
4.2.4.02	Dana Alokasi Umum	500,040,037,000.00	166,091,772,000.00	125,451,181,000.00	291,542,953,000.00	(208,497,084,000.00)
4.2.5	Dana Transfer Khusus	185,444,275,000.00	8,175,461,893.00	38,027,279,275.00	46,202,741,168.00	(139,241,533,832.00)
4.2.5.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	99,803,944,000.00	0.00	19,078,334,475.00	19,078,334,475.00	(80,725,609,525.00)
4.2.5.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	85,640,331,000.00	8,175,461,893.00	18,948,944,800.00	27,124,406,693.00	(58,515,924,307.00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	233,999,124,021.00	50,176,080,045.00	60,765,125,968.00	110,941,206,013.00	(123,057,918,008.00)
4.3.1	Pendapatan Hibah	34,641,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(34,641,000,000.00)
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	13,700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(13,700,000,000.00)
4.3.1.03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	258,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(258,000,000.00)
4.3.1.06	Hibah Dana BOS	20,683,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(20,683,000,000.00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Juli s.d 30 September 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	LEBIH KURANG
4	PENDAPATAN	1,016,438,641,846.00	473,973,131,001.44	275,225,506,390.49	749,198,637,391.93	(267,240,004,454.07)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	87,003,452,925.00	21,454,440,120.44	31,800,607,538.49	53,255,047,658.93	(33,748,405,266.07)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13,425,000,000.00	4,394,175,489.00	3,633,037,443.00	8,027,212,932.00	(5,397,787,068.00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	25,000,000.00	12,640,000.00	8,672,000.00	21,312,000.00	(3,688,000.00)
4.1.1.02	Pajak Restoran	2,000,000,000.00	643,063,817.00	454,312,753.00	1,097,376,570.00	(902,623,430.00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	50,000,000.00	8,266,500.00	700,000.00	8,966,500.00	(41,033,500.00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	100,000,000.00	54,074,040.00	33,227,100.00	87,301,140.00	(12,698,860.00)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	3,900,000,000.00	2,157,046,216.00	1,092,399,050.00	3,249,445,266.00	(650,554,734.00)
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2,500,000,000.00	295,885,783.00	394,092,508.00	689,978,291.00	(1,810,021,709.00)
4.1.1.07	Pajak Parkir	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	10,000,000.00	0.00	4,583,065.00	4,583,065.00	(5,416,935.00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3,580,000,000.00	822,927,440.00	1,310,181,068.00	2,133,108,508.00	(1,446,891,492.00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1,250,000,000.00	400,271,693.00	334,869,899.00	735,141,592.00	(514,858,408.00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,395,000,000.00	2,231,560,914.00	1,421,827,380.00	3,653,388,294.00	(741,611,706.00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1,285,000,000.00	1,768,461,650.00	615,564,800.00	2,384,026,450.00	1,099,026,450.00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2,410,000,000.00	330,010,250.00	460,587,000.00	790,597,250.00	(1,619,402,750.00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	700,000,000.00	133,089,014.00	345,675,580.00	478,764,594.00	(221,235,406.00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,000,000,000.00	1,838,644,385.00	0.00	1,838,644,385.00	(161,355,615.00)
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2,000,000,000.00	1,838,644,385.00	0.00	1,838,644,385.00	(161,355,615.00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67,183,452,925.00	12,990,059,332.44	26,745,742,715.49	39,735,802,047.93	(27,447,650,877.07)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000,000.00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1,900,000,000.00	358,742,988.40	100,794,214.00	459,537,202.40	(1,440,462,797.60)
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	5,500,000,000.00	2,178,669,570.64	1,152,593,735.49	3,331,263,306.13	(2,168,736,693.87)
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	6,150,000,000.00	447,320,646.08	778,041,761.00	1,225,362,407.08	(4,924,637,592.92)
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	500,000,000.00	46,558,042.00	55,013,593.00	101,571,635.00	(396,428,365.00)
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	41,000,000,000.00	6,023,727,887.00	21,840,281,912.00	27,864,009,799.00	(13,135,990,201.00)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	827,232,925.00	463,649,494.32	315,739,232.00	779,388,726.32	(47,844,198.68)
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	10,301,220,000.00	3,471,390,704.00	2,503,278,268.00	5,974,668,972.00	(4,326,551,028.00)
4.2	DANA PERIMBANGAN	696,384,464,900.00	341,577,484,868.00	207,076,441,555.00	548,653,926,423.00	(147,730,538,477.00)
4.2.4	Dana Transfer Umum	510,940,189,900.00	295,374,743,700.00	129,135,265,300.00	424,510,009,000.00	(86,430,180,900.00)
4.2.4.01	Dana Bagi Hasil	10,900,152,900.00	3,831,790,700.00	3,684,083,300.00	7,515,874,000.00	(3,384,278,900.00)
4.2.4.02	Dana Alokasi Umum	500,040,037,000.00	291,542,953,000.00	125,451,182,000.00	416,994,135,000.00	(83,045,902,000.00)
4.2.5	Dana Transfer Khusus	185,444,275,000.00	46,202,741,168.00	77,941,176,255.00	124,143,917,423.00	(61,300,357,577.00)
4.2.5.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	99,803,944,000.00	19,078,334,475.00	40,803,436,255.00	59,881,770,730.00	(39,922,173,270.00)
4.2.5.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	85,640,331,000.00	27,124,406,693.00	37,137,740,000.00	64,262,146,693.00	(21,378,184,307.00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	233,050,724,021.00	110,941,206,013.00	36,348,457,297.00	147,289,663,310.00	(85,761,060,711.00)
4.3.1	Pendapatan Hibah	33,692,600,000.00	0.00	12,130,123,200.00	12,130,123,200.00	(21,562,476,800.00)
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	13,700,000,000.00	0.00	488,775,200.00	488,775,200.00	(13,211,224,800.00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Oktober s.d 31 Desember 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH/KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODEINI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	1,016,438,641,846.00	749,198,637,391.93	227,339,227,871.51	976,537,865,263.44	(39,900,776,582.56)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	87,003,452,925.00	53,255,047,658.93	22,469,556,427.51	75,724,604,086.44	(11,278,848,838.56)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13,425,000,000.00	8,027,212,932.00	3,285,621,180.00	11,312,834,112.00	(2,112,165,888.00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	25,000,000.00	21,312,000.00	5,300,000.00	26,612,000.00	1,612,000.00
4.1.1.02	Pajak Restoran	2,000,000,000.00	1,097,376,570.00	530,670,103.00	1,628,046,673.00	(371,953,327.00)
4.1.1.03	Pajak Hiburan	50,000,000.00	8,966,500.00	0.00	8,966,500.00	(41,033,500.00)
4.1.1.04	Pajak Reklame	100,000,000.00	87,301,140.00	29,879,625.00	117,180,765.00	17,180,765.00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	3,900,000,000.00	3,249,445,266.00	1,104,281,057.00	4,353,726,323.00	453,726,323.00
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2,500,000,000.00	689,978,291.00	811,868,737.00	1,501,847,028.00	(998,152,972.00)
4.1.1.07	Pajak Parkir	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(10,000,000.00)
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	10,000,000.00	4,583,065.00	0.00	4,583,065.00	(5,416,935.00)
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3,580,000,000.00	2,133,108,508.00	420,106,402.00	2,553,214,910.00	(1,026,785,090.00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1,250,000,000.00	735,141,592.00	383,515,256.00	1,118,656,848.00	(131,343,152.00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,395,000,000.00	3,653,388,294.00	2,424,861,641.00	6,078,249,935.00	1,683,249,935.00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1,285,000,000.00	2,384,026,450.00	2,013,619,852.00	4,397,646,302.00	3,112,646,302.00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2,410,000,000.00	790,597,250.00	224,538,000.00	1,015,135,250.00	(1,394,864,750.00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	700,000,000.00	478,764,594.00	186,703,789.00	665,468,383.00	(34,531,617.00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,000,000,000.00	1,838,644,385.00	0.00	1,838,644,385.00	(161,355,615.00)
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2,000,000,000.00	1,838,644,385.00	0.00	1,838,644,385.00	(161,355,615.00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67,183,452,925.00	39,735,802,047.93	16,759,073,606.51	56,494,875,654.44	(10,688,577,270.56)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000,000.00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1,900,000,000.00	459,537,202.40	110,190,506.80	569,727,709.20	(1,330,272,290.80)
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	5,500,000,000.00	3,331,263,306.13	1,838,710,139.91	5,169,973,446.04	(330,026,553.96)
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	6,150,000,000.00	1,225,362,407.08	524,276,994.00	1,749,639,401.08	(4,400,360,598.92)
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(5,000,000.00)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	500,000,000.00	101,571,635.00	303,862.00	101,875,497.00	(398,124,503.00)
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	41,000,000,000.00	27,864,009,799.00	11,992,147,408.00	39,856,157,207.00	(1,143,842,793.00)
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	827,232,925.00	779,388,726.32	82,150,076.80	861,538,803.12	34,305,878.12
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitalis JKN	10,301,220,000.00	5,974,668,972.00	2,211,294,619.00	8,185,963,591.00	(2,115,256,409.00)
4.2	DANA PERIMBANGAN	696,384,464,900.00	548,653,926,423.00	132,409,226,366.00	681,063,152,789.00	(15,321,312,111.00)
4.2.4	Dana Transfer Umum	510,940,189,900.00	424,510,009,000.00	83,314,392,675.00	507,824,401,675.00	(3,115,788,225.00)
4.2.4.01	Dana Bagi Hasil	10,900,152,900.00	7,515,874,000.00	268,490,675.00	7,784,364,675.00	(3,115,788,225.00)
4.2.4.02	Dana Alokasi Umum	500,040,037,000.00	416,994,135,000.00	83,045,902,000.00	500,040,037,000.00	0.00
4.2.5	Dana Transfer Khusus	185,444,275,000.00	124,143,917,423.00	49,094,833,691.00	173,238,751,114.00	(12,205,523,886.00)
4.2.5.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	99,803,944,000.00	59,881,770,730.00	37,224,311,071.00	97,106,081,801.00	(2,697,862,199.00)
4.2.5.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	85,640,331,000.00	64,262,146,693.00	11,870,522,620.00	76,132,669,313.00	(9,507,661,687.00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	233,050,724,021.00	147,289,663,310.00	72,460,445,078.00	219,750,108,388.00	(13,300,615,633.00)
4.3.1	Pendapatan Hibah	33,692,600,000.00	12,130,123,200.00	12,462,268,000.00	24,592,391,200.00	(9,100,208,800.00)
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	13,700,000,000.00	488,775,200.00	0.00	488,775,200.00	(13,211,224,800.00)

Lampiran Data Sekunder

Tabel Realisasi Anggaran Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Triwulan	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Realisasi PAD
2015	I	1.550.000	91.014.804	2.250.000	9.818.384.552
	II	1.850.000	246.025.535	2.250.000	25.164.932.036
	III	4.730.000	380.563.652	2.250.000	31.359.543.006
	IV	5.530.000	579.815.712	2.250.000	54.420.838.966
2016	I	2.650.000	132.020.289	-	11.799.250.889
	II	3.650.000	353.262.877	-	27.739.873.854
	III	6.000.000	597.590.562	5.310.000	45.485.851.229
	IV	7.550.000	861.841.020	6.585.000	62.079.454.189
2017	I	3.060.000	114.133.583	-	15.199.765.386
	II	5.210.000	338.493.337	1.530.000	28.515.293.147
	III	9.810.000	579.316.264	2.490.000	50.070.137.196
	IV	12.260.000	979.521.012	9.831.000	86.197.832.174
2018	I	4.800.000	165.505.588	6.371.000	12.011.705.447
	II	9.470.000	464.176.819	10.274.000	30.693.888.114
	III	15.020.000	768.416.503	11.586.500	45.104.701.361
	IV	23.030.000	1.361.459.952	13.262.500	65.095.212.711
2019	I	3.959.000	268.610.000	7.615.000	7.345.456.000
	II	12.640.000	643.063.000	8.266.000	21.454.440.000
	III	21.312.000	1.097.376.000	8.966.000	53.255.440.000
	IV	26.612.000	1,628,046,000	8,966,000	75,724,604,000

Lampiran Hasil Pengujian Statistik

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Lnx3, Lnx2, Lnx1 ^b		. Enter

a. Dependent Variable: Lny

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.916 ^a	.839	.802	.32187	.946

a. Predictors: (Constant), Lnx3, Lnx2, Lnx1

b. Dependent Variable: Lny

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.005	3	2.335	22.537	.000 ^b
	Residual	1.347	13	.104		
	Total	8.351	16			

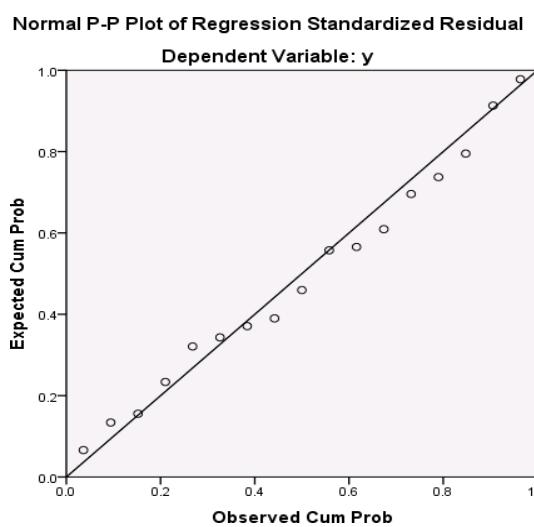
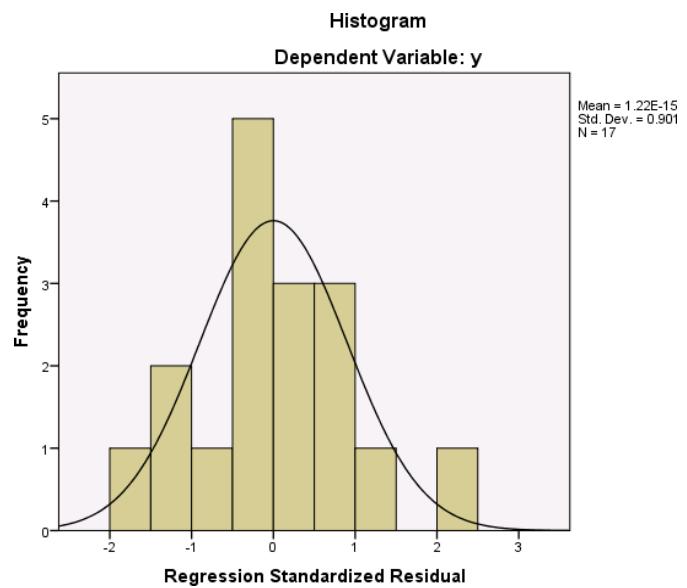
a. Dependent Variable: Lny

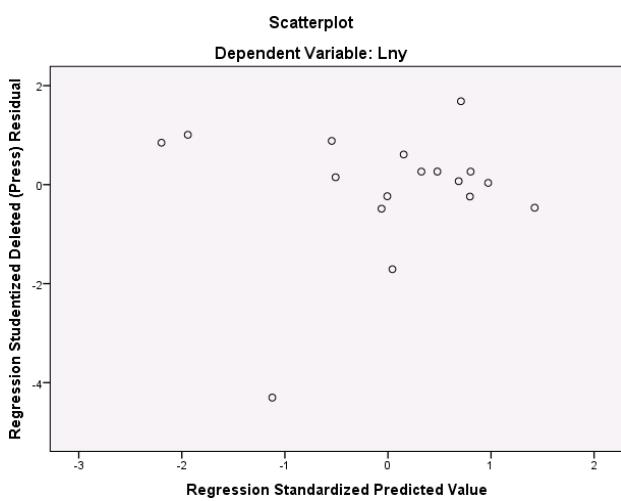
b. Predictors: (Constant), Lnx3, Lnx2, Lnx1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	4.083	1.169		3.493	.004		
1	Lnx1	-.184	.272	-.207	-.676	.511	.132
	Lnx2	1.157	.250	1.222	4.620	.000	.177
	Lnx3	-.302	.162	-.301	-1.866	.085	.477

a. Dependent Variable: Lny







PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Pusat Pemerintahan No. 002 Jl. Bahrudin Jusuf Habibie Kecamatan Suwawa - 96184

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900/BKPD-BB/96 /VIII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUSNI BOLILIO, S.Sos

NIP : 19630702 198602 1 003

Pangkat, Gol/Ruang : Pembina Tkt I, IV/b

Jabatan : Kepala Badan

Dengan ini memberikan Surat Keterangan kepada :

Nama : LILIS A. UDALI

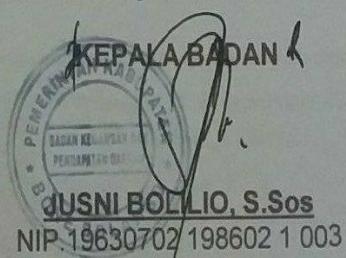
Nim : E1116055

Jabatan/Tempat/Identitas : Peneliti/Badan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kab. Bone Bolango/Desa Wonggarasi
Barat Kec. Lemito Kab. Pohuwato

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian dengan
Judul Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Demikian surat keterangan dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Suwawa, 18 Agustus 2020





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Telp. (0435)8591815
Website : <http://perizinan.bonebolangokab.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 503/DPMPTSPNAKER-BB/IPM/0267/XI/2019

GRATIS

Dasar	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Surat Keterangan Penelitian. 2. Peraturan Bupati Bone Bolango 33 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Peyelenggarra Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Membaca	: Protokol/Proposal Penelitian dari Mahasiswa tersebut secara lengkap.
Menimbang	: Surat Permohonan Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Ichsan Gorontalo Nomor 1905/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2019 Tanggal 25 November 2019 perihal Permohonan Izin Penelitian

MENERANGKAN

- a. Nama/Nim : LILIS A UDAILI
b. Alamat Peneliti : JL. - KEL./DESA WONGGARASI BARAT KECAMATAN LEMITO KAB./KOTA. PAHUWATO PROVINSI GORONTALO
c. Judul Penelitian : PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

d. Tujuan Penelitian : Untuk Penyusunan Skripsi
e. Tempat Penelitian : Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango

f. Waktu Penelitian : Sejak Tanggal Ditetapkan
g. Bidang Penelitian : Akuntansi
h. Status Penelitian : Baru
i. Penanggungjawab : Dr. Rahmisyari, ST., SE.
j. Anggota Peneliti : 1. - 4. -
 2. - 5. -
 3. - 6. -

e. Nama Lembaga : Lembaa Penelitian (LEMLIT) Universitas Ichsan Gorontalo

Pada prinsipnya rencana penelitian yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta yang bersangkutan disetujui untuk melanjutkan penelitian dengan ketentuan :

1. Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian yang bersangkutan bedasarkan pada kerangka kerja/proposal/protokol yang
 2. Peneliti harus menyampaikan hasil penelitiannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja setelah selesai melakukan penelitian.
 3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan 28 November 2020 dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali apabila yang bersangkutan belum selesai melakukan penelitian.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam melakukan



Tilongkabila, 28 November 2019
AH KABUPATEN
KEPALA DINAS
PEMANAHAN RODA,
AN TERPADU SATU PINTU
JALI TENAGA KERJA
* * *
JUMAIIDIL AP. S.Sos.Mec.Dev
Pembina Utama Muda
Nip. 19741018 199311 1 002

1. Bupati Bone Balonco di Suwawa sebagai laporan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS ICHSAN

(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0439/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : LILIS A. UDALI
NIM : E1116055
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli
Daerah kabupaten Bone Bolango

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 14%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 27 Juli 2020

Tim Verifikasi,

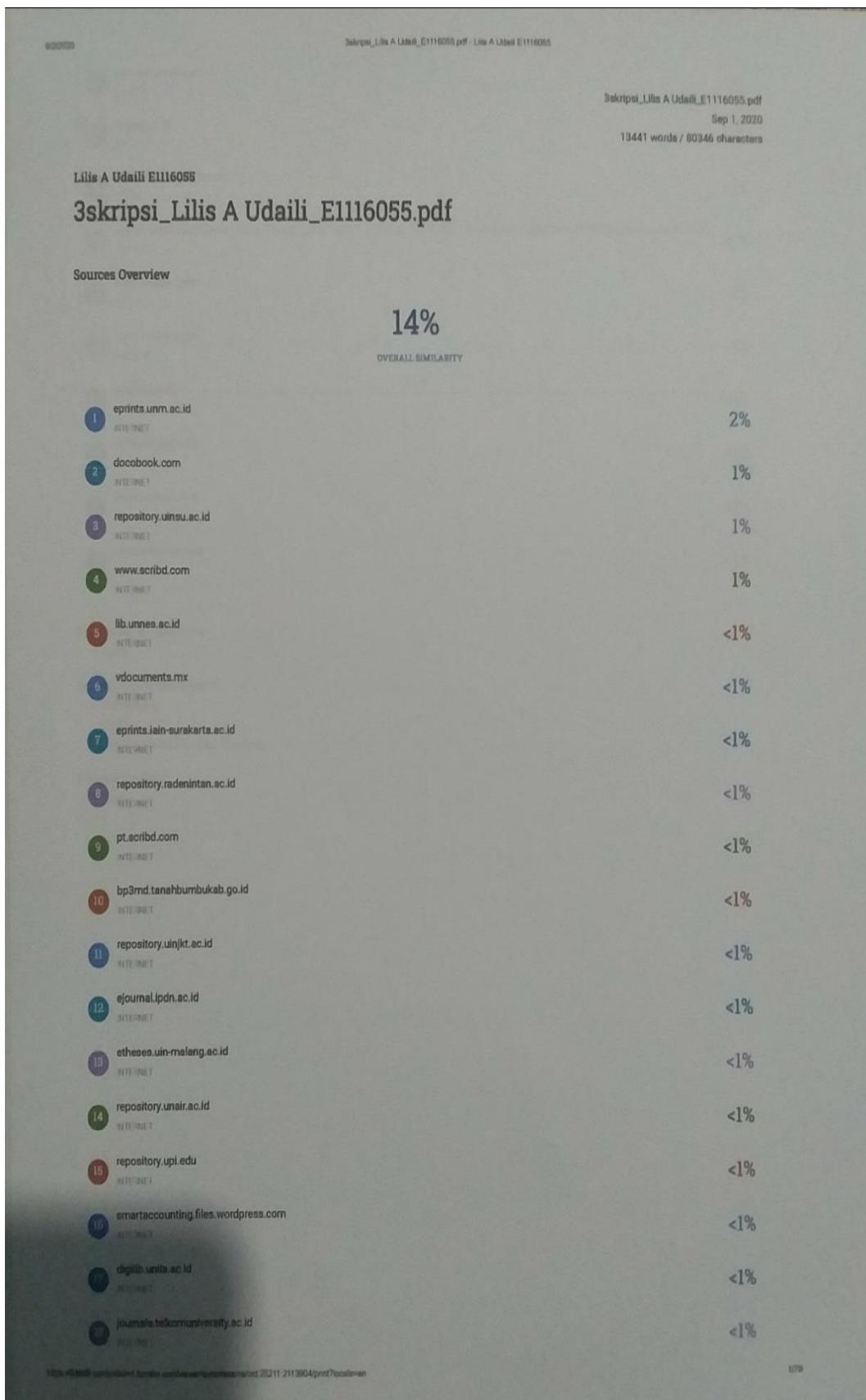


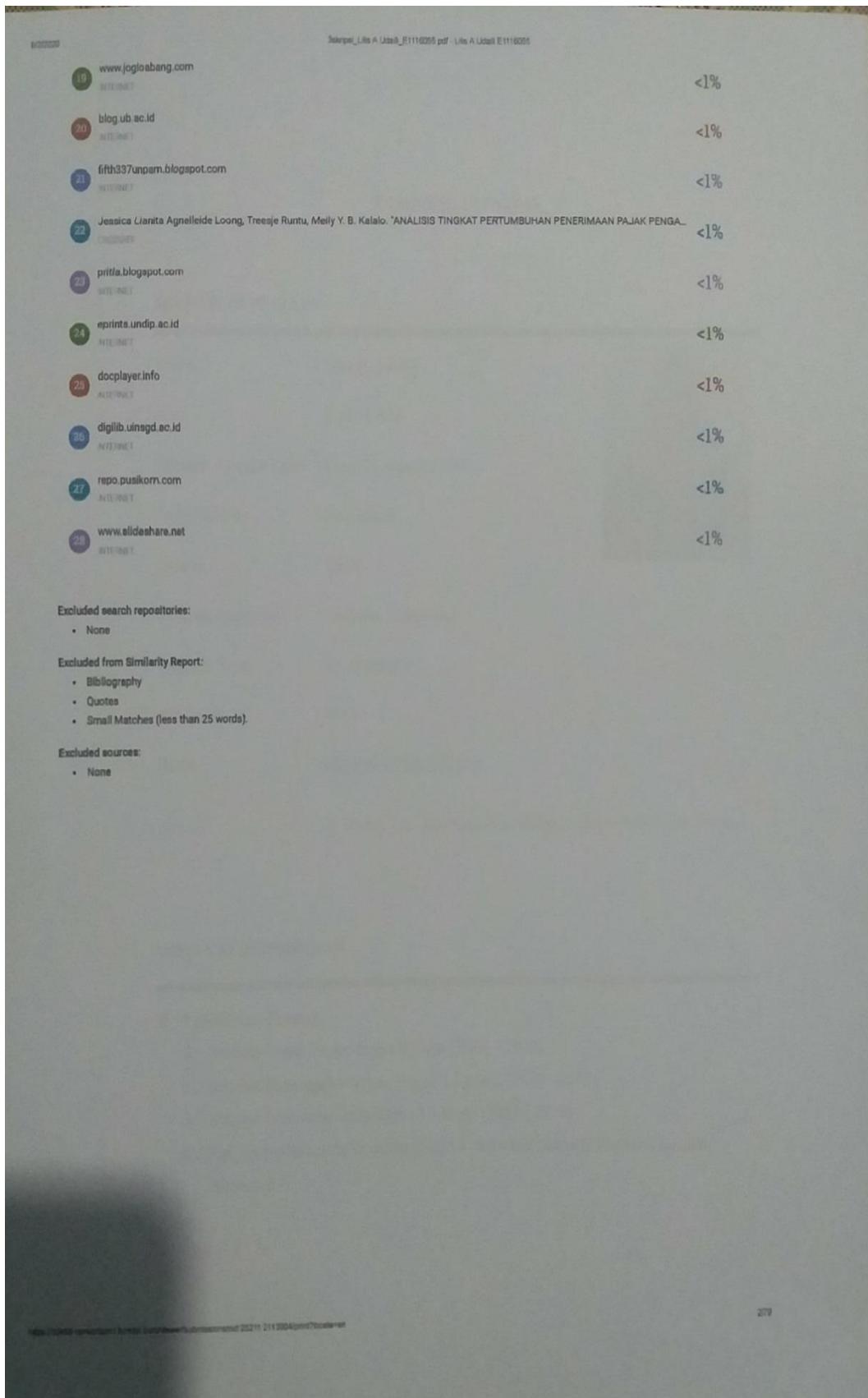
Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip





CURRICULUM VITAE

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Lilis A. Udaili

Nim : E.11.16.055

Tempat, Tanggal Lahir : Tapa, 26 Agustus 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Program Studi : S1 Akuntansi

Angkatan : 2016

Email : lilisudaili97@gmail.com

Alamat : Jl. Mongi'ilo, Desa Kopi Kec. Bulango Utara, Kab. Bone Bolango



RIWAYAT PENDIDIKAN

❖ Pendidikan Formal :

1. Sekolah Dasar Negeri Inpers 2 Tupa (2004 – 2010)
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lemito (2010 - 2013)
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lemito (2013 – 2016)
4. Tingkat Sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi